



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**

**PADANG, Juli 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja Tahun 2020 berpedoman pada hasil verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah, hasil forum Perangkat Daerah, dan revisi Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju dari kegiatan. Tujuan penyusunan RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini adalah untuk memberi gambaran rencana kerja satu tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan kehutanan Sumatera Barat.

Selanjutnya ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini dan akhirnya semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Padang, Juli 2019  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .....	39
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	42
2.4 Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD.....	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kehutanan .....	62
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan .....	64
BAB IV PENUTUP.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1 Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2018 .....	15
Tabel .2 Realisasi Program Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang bersumber dari dana APBD .....	16
Tabel .3 Realisasi Program Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang bersumber dari dana APBN (dana Dekonsentrasi) .....	22
Tabel . Pecapaian IKU, Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	33
Tabel .4 Langkah-Langkah Pencapaian Sasaran Strategis.....	50
Tabel .5 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran .....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

		halaman
Lampiran 1. Tabel T - C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah .....	89
Lampiran 2. Tabel. T- C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	93
Lampiran 3. Tabel T- C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 .....	109
Lampiran 4. Tabel T – C 32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020.....	121
Lampiran 5. Tabel T – C 33	Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 .....	129

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Daerah Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sumatera Barat.

Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat

ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahap yaitu: Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan renja, perumusan rancangan akhir renja dan penetapan renja SKPD.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/376/VII/ Ren.Makro/Bappeda-2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Penyampaian Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai Bahan Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah mengakomodir implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) sesuai kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan kewenangannya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang yang berpedoman pada Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 serta juga mempedomani Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/1319/XII/Ren.Makro/Bappeda-2018 tanggal 21 Desember 2019 Perihal Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2020.

Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Revisi Renstra Dinas untuk melaksanakan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Revisi Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

# BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas

pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Renja SKPD.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA**

### **PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan, Kegiatan pembangunan kehutanan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 menghasilkan keluaran kegiatan antara lain:

Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota	10 UPTD /KPH
Meningkatnya kelompok/ lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN,HTR dan HR Kemitraan)	25 Kelompok
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	180 Orang
Terjalannya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR, dan HR Kemitraan)	110 orang
Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove	6 Kali
Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	5 Unit
Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	75 orang
termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan	10 kab/kota
termonitornya izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu	13 kab/kota
Hutan pada wilayah kelola KPH terencana dan termanfaatkan	5 petak
Potensi hasil hutan diwilayah KPH yang terkelola	2 Komoditi
Jumlah unit kemitraan	4 Unit
terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km
penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali	23 unit
Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan	10 buku
Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	20 Kali
tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih	250000 batang
sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	7 unit
Terbangunnya dan terpeliharanya sumber daya genetik	4 unit
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan	10 UPTD/KPH
Terlaksananya implementasi ISO 9000:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Laporan
Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	2 laporan
Tersedianya data neraca sumber daya hutan	1 Buku
Kebutuhan peningkatan SDM yang terpenuhi	24 Kali
kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	100%
jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	450 orang

tersedianya data simpanan karbon	20 petak
wilayah kelola KPH yang di konservasi	1 lokasi
Peta rawan bencana kawasan hutan	6 peta
terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 Unit
Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan	1 laporan
Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	1 Lokasi
Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan	180 Ha
terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi	10 lokasi
Daerah aliran sungai yang terkendali	2 das
Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan	15%
Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata (DAK)	10 unit
Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks gini (DAK)	6 unit
Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih (DBH-DR)	400.000btg dan 3 sumber benih tanaman hutan
Jumlah kelompok pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha perhutanan sosial (DBH-DR)	50 kelompok
Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	406 unit
Terlaksananya penanaman pada lahan kritis	10 KPH
Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor (DAK)	1.086 Ha
Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor (DAK)	12 unit
Terlaksananya penanaman pada lahan kritis	10 KPH
Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata (DAK)	1 paket
Jumlah kelompok perhutanan social yang terusulkan (DBH-DR)	10 kelompok
Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya (DBH-DR)	6 KTH
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis dan jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha (DBH-DR)	160 orang dan 80 orang
Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan programa penyuluh kehutanan PNS dan PKSM (DBH-DR)	90 orang penyuluh
Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti bimbingan teknis RHL dan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan RHL bagi masyarakat sekitar RHL (DBH-DR)	85 orang dan 90 orang
Jumlah konflik dan hutan adat yang teridentifikasi dan terfasilitasi (DBH-DR)	15 buah
Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	450
Jumlah peserta bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	375 orang
Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	40 kali
Jumlah ground check hot spot (DBH-DR)	10 kali
Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	15 kali
Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	10 kali
Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	30 kali
Jumlah patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	25 kali
kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 bulan
kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 bulan
pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan terpenuhi	12 bulan
jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 bulan
kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 bulan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bulan

kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan
kebutuhan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 bulan
Pertemuan atau rapat yang diselenggarakan	12 bulan
rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	12 bulan
publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 bulan
wirid kantor dan kegiatan senam dikantor	12 bulan
Honorium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 Bulan
Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 bulan
peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	53 unit
gedung kantor yang terpelihara	3 unit
Instalasi dan Jaringan kantor yang terpelihara	6 bulan
kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	26 unit
Gedung kantor yang terbangun	1 unit
kebutuhan meubelair yang terpenuhi	15 unit
Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Mess yang terpelihara	2 unit
kebutuhan kendaraan operasional yang terpenuhi	1 unit
aparatur sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	6 kali
kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	573 orang
Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang terbayarkan	12 bulan
laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5 dokumen
Dokumen RKA, DPA , DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	6 Dokumen

Hasil Kegiatan tersebut diatas berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Dalam Renstra Dinas Kehutanan berupa:

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat.
4. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan bidang kehutanan Tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) realisasi sampai dengan Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilaksanakan dengan 13 program yang terdiri dari 85 kegiatan bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Barat,

DAK dan DBH-DR. Total Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2018 adalah sebesar Rp 57.392.452.904,-. Rincian anggaran pada Dinas Kehutanan Tahun 2018 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan sebesar Rp 49.296.878.187,- dan setelah perubahan menjadi Rp 45.776.541.798,-
2. Belanja Langsung sebelum perubahan sebesar Rp 65.561.672.204,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 57.392.452.904,- yang terdiri dari :
  - a. Belanja Langsung Pokok (5 Program, 27 Kegiatan) sebesar Rp. 6.525.115.721,-
  - b. Belanja Langsung Kegiatan (8 Program, 58 Kegiatan) sebesar Rp. 50.867.337.183,-.

Anggaran Kegiatan Tahun 2018 jika dibandingkan dengan anggaran Tahun 2017 mengalami peningkatan yang sebesar Rp 19.626.823.915,-. Meningkatnya dana yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan penambahan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR). Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Pagu Dana Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Dana (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	45.776.541.798	43.304.601.939	94,60	100	2.471.939.859
2	Belanja Langsung	57.392.452.904	49.565.974.933	86,36	97,66	7.826.477.971
	a. BL. Pokok	6.525.115.721	5.557.671.362	85,17	99,81	967.444.359
	b. BL Kegiatan	50.867.337.183	44.008.303.571	86,52	97,39	6.859.033.612
	<b>TOTAL</b>	<b>103.168.994.702</b>	<b>92.870.576.872</b>	<b>90,02</b>	<b>98,70</b>	<b>10.298.417.830</b>

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Realisasi Program Kegiatan dana APBD pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI		KETERANGAN (Sisa Anggaran)
		FISIK	KEUANGAN	
		%	Rp.	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b><u>BELANJA TIDAK LANGSUNG</u></b>	<b><u>45,776,541,798</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>43,304,601,939</u></b>	<b><u>2,471,939,859</u></b>
-	-	-	-	-
<u>Belanja Pegawai</u>	<u>45,776,541,797.67</u>	<u>100.00</u>	<u>43,304,601,939</u>	<u>2,471,939,859</u>
<u>Gaji dan Tunjangan</u>	<u>34,040,333,967.67</u>	<u>100.00</u>	<u>31,893,431,557</u>	<u>2,146,902,411</u>
1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	25,224,999,945.67	100.00	24,784,726,919	440,273,027
2. Tunjangan Keluarga	3,250,045,000	100.00	2,505,386,912	744,658,088
3. Tunjangan Jabatan	655,340,000	100.00	520,720,000	134,620,000
4. Tunjangan Fungsional	2,145,360,000	100.00	1,836,805,000	308,555,000
5. Tunjangan Fungsional Umum	1,038,722,310	100.00	705,565,000	333,157,310
6. Tunjangan Beras	1,411,357,352	100.00	1,297,549,140	113,808,212
7. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	60,440,868	100.00	50,836,909	9,603,959
8. Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	184,191,935	100.00	152,530,568	31,661,367
9. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	68,750,000	100.00	38,985,285	29,764,715
10. Pembulatan Gaji	1,126,557	100.00	325,824	800,733
<u>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</u>	<u>11,735,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>11,411,170,382</u>	<u>323,829,618</u>
1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11,735,000,000	100.00	11,411,170,382	323,829,618
<u>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</u>	<u>1,207,830</u>	-	-	<u>1,207,830</u>
1. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	1,207,830	-	-	1,207,830
2. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
<b><u>BELANJA LANGSUNG</u></b>	<b><u>57,392,452,904</u></b>	<b><u>97.66</u></b>	<b><u>49,565,974,933</u></b>	<b><u>7,826,477,971</u></b>
<b><u>BELANJA LANGSUNG POKOK</u></b>	<b><u>6,525,115,721</u></b>	<b><u>99.81</u></b>	<b><u>5,557,671,362</u></b>	<b><u>967,444,359</u></b>
<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	<u>3,085,487,721</u>	<u>99.59</u>	<u>2,441,678,477</u>	<u>643,809,244</u>
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84,652,000	100.00	69,613,480	15,038,520
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	725,600,000	100.00	402,122,766	323,477,234
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	1,080,194,752	100.00	1,041,543,214	38,651,538
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	15,400,000	100.00	989,323	14,410,677
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	135,000,000	100.00	129,360,000	5,640,000
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	171,800,000	100.00	171,284,000	516,000
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90,000,000	100.00	90,000,000	-
8. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUndang-Undangan	33,000,000	100.00	22,632,800	10,367,200
9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	510,632,300	100.00	356,058,894	154,573,406

10. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	20,000,000	37.00	7,400,000	12,600,000
11. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	149,208,669	100.00	110,450,000	38,758,669
12. Penyediaan Makanan dan Minuman	70,000,000	100.00	40,224,000	29,776,000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2,135,321,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,935,169,625</b>	<b>200,151,375</b>
1. Pengadaan Mebeleur	100,000,000	100.00	99,145,000	855,000
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300,000,000	100.00	298,924,000	1,076,000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	415,000,000	100.00	362,867,297	52,132,703
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Peralatan/Perlengkapan Kantor	200,000,000	100.00	70,250,000	129,750,000
5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	284,891,000	100.00	271,182,228	13,708,772
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	50,000,000	100.00	49,806,500	193,500
7. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	386,550,000	100.00	386,550,000	-
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess	100,000,000	100.00	99,685,000	315,000
9. Pembangunan Gedung Kantor	200,000,000	100.00	198,598,000	1,402,000
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,880,000	100.00	98,161,600	718,400
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>310,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>271,781,700</b>	<b>38,218,300</b>
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	310,000,000	100.00	271,781,700	38,218,300
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>283,142,000</b>	<b>100.00</b>	<b>217,533,000</b>	<b>65,609,000</b>
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan	283,142,000	100.00	217,533,000	65,609,000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>711,165,000</b>	<b>100.00</b>	<b>691,508,560</b>	<b>19,656,440</b>
1. Penyusunan Perencanaan dan Pnganggaran SKPD	79,875,000	100.00	74,720,280	5,154,720
2. Penatausahaan Keuangan SKPD	514,800,000	100.00	504,363,280	10,436,720
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	116,490,000	100.00	112,425,000	4,065,000
<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>	<b>50,867,337,183</b>	<b>97.39</b>	<b>44,008,303,571</b>	<b>6,859,033,612</b>
<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>9,880,165,060</b>	<b>92.43</b>	<b>7,721,186,131</b>	<b>2,158,978,929</b>
1. Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan	315,900,000	100.00	290,348,551	25,551,449
2. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) & Industri Kehutanan	207,497,700	100.00	204,650,931	2,846,769
3. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH dan Hutan Tanaman	582,964,294	100.00	550,782,745	32,181,549
4. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan	562,033,066	100.00	534,447,900	27,585,166
5. Pengembangan Kemitraan Kehutanan	199,000,000	100.00	176,037,499	22,962,501
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Resort (DAK)	6,507,010,000	100.00	5,214,225,725	1,292,784,275
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wiata (DAK)	747,960,000	-	-	747,960,000

8. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif (DAK) <u>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</u>	757,800,000	100.00	750,692,780	7,107,220
	<u>4,253,399,935</u>	<u>82.34</u>	<u>3,228,916,700</u>	<u>1,024,483,235</u>
1. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	591,873,600	100.00	587,859,450	4,014,150
2. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	157,560,000	100.00	149,471,950	8,088,050
3. Konservasi Sumber Daya Genetik	120,750,000	93.64	89,031,200	31,718,800
4. Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan	3,383,216,335	78.02	2,402,554,100	980,662,235
5. Peredaran Benih/Bibit dan Pengembangan Informasi Perbenihan tanaman hutan	-	-	-	-
<u>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</u>	<u>4,937,286,025</u>	<u>133.86</u>	<u>4,419,001,921</u>	<u>518,284,104</u>
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	198,718,350	100.00	178,777,230	19,941,120
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HN, HTR, dan Hutan Rakyat Kemitraan	390,611,200	100.00	368,443,400	22,167,800
3. Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan HR Kemitraan	558,986,800	100.00	462,096,766	96,890,034
4. Pengembangan Hutan Mangrove	108,743,500	95.71	92,253,000	16,490,500
5. Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat	159,000,000	100.00	150,587,500	8,412,500
6. Peningkatan Kapasitas Penyuluh kehutanan	262,450,000	100.00	235,183,900	27,266,100
7. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	400,000,000	100.00	387,265,650	12,734,350
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	-	-	-	-
9. Peningkatan Kelembagaan Penyuluh Kehutanan	-	-	-	-
10. Pembinaan dan Penguatan SDM Pengelola Perutanan Sosial	-	-	-	-
11. Penyiapan Perhutanan Sosial	689,534,000	100.00	578,664,800	110,869,200
12. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	1,010,000,000	100.00	861,784,025	148,215,975
13. Pemberdayaan KTH melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola usaha	306,175,475	100.00	268,412,000	37,763,475
14. Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan	361,875,300	100.00	359,475,300	2,400,000
15. Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	236,126,100	100.00	227,838,050	8,288,050
16. Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan	255,065,300	100.00	248,220,300	6,845,000
<u>Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan</u>	<u>1,184,109,440</u>	<u>100.00</u>	<u>984,690,250</u>	<u>199,419,190</u>
1. Pengendalian Penggunaan Pemanfaatan Kawasan Hutan	197,957,250	100.00	180,180,800	17,776,450
2. Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	243,200,000	100.00	187,586,550	55,613,450
3. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	214,500,000	100.00	208,353,100	6,146,900
4. Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan	446,000,000	100.00	349,909,450	96,090,550
5. Penganganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	82,452,190	100.00	58,660,350	23,791,840
<u>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</u>	<u>12,298,000,000</u>	<u>94.50</u>	<u>10,776,596,792</u>	<u>1,521,403,208</u>
1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1,201,500,000	90.00	1,003,444,700	198,055,300
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-

3.	Penyadartahuan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
4.	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	8,918,022,500	100.00	8,377,946,250	540,076,250
5.	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran HUTan dan Lahan melalui Berbagai Ragam Metode	491,039,500	66.67	283,698,450	207,341,050
6.	Pelatihan/Pembekalan/In House Training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	292,232,500	100.00	269,428,342	22,804,158
7.	Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan	88,831,250	10.00	8,694,750	80,136,500
8.	Ground Check Hotspot dan/atau informasi kebakaran	61,812,500	1.00	412,500	61,400,000
9.	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	271,420,000	10.00	26,680,850	244,739,150
10.	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	174,012,500	100.00	163,472,000	10,540,500
11.	Peningkatan Koordinasi melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain	245,878,000	96.97	151,875,450	94,002,550
12.	Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait lainnya	553,251,250	100.00	490,943,500	62,307,750
<u>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</u>		<u>4,519,931,510</u>	<u>94.76</u>	<u>4,155,866,216</u>	<u>364,065,294</u>
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	985,400,000	100.00	967,327,575	18,072,425
2	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	137,000,000	100.00	122,343,613	14,656,387
3	Pengendalian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	132,260,000	100.00	117,117,500	15,142,500
4	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	2,531,159,410	90.72	2,296,346,723	234,812,687
5	Pengukuran Simpanan Karbon	328,000,000	100.00	283,594,256	44,405,744
6	Konservasi Alam Wilayah Kelola KPH	153,229,850	98.63	144,691,430	8,538,420
7	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	151,308,750	100.00	129,085,219	22,223,531
8	Penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan	101,573,500	100.00	95,359,900	6,213,600
9	Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan hutan	-	-	-	-
10	Penguatan Sumebr Daya Manusia (SDM) Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) dan Perlindungan Hutan	-	-	-	-
<u>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</u>		<u>983,290,313</u>	<u>100.00</u>	<u>928,544,120</u>	<u>54,746,193</u>
1.	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	231,575,300	100.00	211,503,425	20,071,875
2.	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	297,667,363	100.00	281,126,925	16,540,438
3.	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	119,690,000	100.00	103,345,900	16,344,100
4.	Peningkatan Kapasitas SDM	-	-	-	-
5.	Monitoring pelaksanaan pembangunan Kehutanan	334,357,650	100.00	332,567,870	1,789,780
<u>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</u>		<u>12,811,154,900</u>	<u>95.41</u>	<u>11,793,501,441</u>	<u>1,017,653,459</u>
1.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	1,372,117,600	97.28	1,266,818,170	105,299,430
2.	Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL	375,873,300	95.32	350,067,845	25,805,455
3.	Pengendalian Pengelolaan Daerah Airan Sungai	581,330,000	100.00	483,280,520	98,049,480
4.	Pembuatan Tanaman (DAK)	5,271,196,992	90.79	4,715,157,720	556,039,272
5.	Pembangunan DAM Penahan (DAK)	438,613,008	91.67	384,089,336	54,523,672
6.	Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan	4,772,024,000	99.76	4,594,087,850	177,936,150
<b>JUMLAH</b>		<b>103,168,994,701.67</b>	<b>98.70</b>	<b>92,870,576,872</b>	<b>10,298,417,829.67</b>

Realisasi fisik kegiatan tahun 2018 sebesar 98,70%, tidak tercapainya realisasi fisik 100 % dikarenakan ada beberapa sub kegiatan dari beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Adanya Kegiatan yang bersifat situasional yang secara kondisi memang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi: pemadaman kebakaran hutan dan lahan, monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan, ground check hot spot dan/atau informasi kebakaran.
2. Pembangunan sarana dan prasarana wisata yang merupakan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana pariwisata pada wilayah kelola KPH tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dokumen izin lingkungan.
3. Kegiatan Dam Penaman sebanyak 1 unit dan kegiatan Pembuatan Tanaman seluas 100 Ha pada wilayah kelola KPHP dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena adanya konflik lahan dengan masyarakat.

Sementara tidak tercapainya 100% target keuangan pada Tahun Anggaran 2018 merupakan akibat sisa anggaran yang tidak direalisasikan merupakan langkah-langkah penghematan dan efisiensi anggaran serta sisa mati kegiatan yang bersumber dari belanja bahan bakar minyak, belanja perjalanan dinas (penginapan dan tiket pesawat), belanja transportasi, sisa lelang dan beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan teknis.

Beberapa kegiatan yang mempunyai realisasi keuangan dibawah 90% antara lain adalah :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 84.652.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 69.613.480 (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau (82,23%) dengan fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 15.038.520,- merupakan sisa mati dari anggaran BBM dan Caraka, sisa mati pembelian perangk, dan sisa mati sewa kotak pos, dibayarkan sesuai dengan kebutuhan Dinas dan UPTD Dinas Kehutanan.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 725.600.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 402.122.766,- (Empat Ratus Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau (55,42%) dengan fisik 100%.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 323.477.234,- merupakan sisa mati pembayaran telepon pembayaran air, dan pembayaran listrik serta untuk pembayaran bulan desember 2018 baru dapat dibayarkan di bulan januari 2019, sehingga menjadi hutang jangka pendek.
3. Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dengan dana sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 989.323,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau (6,42%) dengan fisik 100 %.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 14.410.677,- merupakan sisa mati dari pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai yang tertera pada dalam tagihan pembayaran PBB.
4. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 22.632.800,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau (68,58%) dengan fisik 100%.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 10.367.200,- merupakan sisa anggaran yang diperuntukan pada UPTD KPH Dinas Kehutanan yang tidak terlaksana.
5. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum dengan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 40.224.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) atau (57,46%) dengan fisik 100%.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 29.776.000,- merupakan sisa mati kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan rapat yang dilaksanakan.
6. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan dana sebesar Rp. 510.632.300,- (Lima Ratus Sepuluh Satu Juta Rupiah Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 356.058.894,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima

Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau (69,73%) dengan fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 154.573.406,- merupakan efisiensi/ penghematan bahan bakar perjalanan dinas, penginapan dan honorarium. Kegiatan juga bersifat situasional/ berupa undangan yang masuk dari instansi lain.

7. Kegiatan penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) realisasi Rp. 7.100.000,- (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah), atau (35,50%) dengan fisik 35,50%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 12.900.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan liputan yang dilaksanakan.

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), setelah perubahan menjadi Rp. 149.208.669,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapa Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) untuk kegiatan Outbond, realisasi keuangan sebesar Rp. 110.450.000,- (Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau (74,02%) dengan fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 38.756.669,- merupakan sisa mati yang terdiri dari:

- Honorarium pelatih senam sebesar Rp. 10.860.000,-
- Honorarium pembaca Al-Qur'an sebesar Rp. 12.100.000,-
- Honorarium penceramah sebesar Rp. 15.590.000,-
- Sisa mati anggaran Outbond sebesar Rp. 208.669,-

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dengan dana sebesar Rp. 415.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), realisasi sebesar Rp. 362.867.297,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau (87,44%) dengan fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 52.132.703,- merupakan sisa mati kegiatan dengan rincian :

- Sisa mati kegiatan asuransi kendaraan roda empat sebesar Rp. 797.189,-
- Sisa mati kegiatan jasa service sebesar Rp. 42.558.30,-
- Sisa mati pembelian BBM/Pelumas sebesar Rp. 6.043.650,-
- Sisa mati jasa KIR sebesar Rp. 2.000.000,-
- Sisamati pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp. 733.564,-

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 70.250.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau (35,15%) dengan fisik 100%.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 129.750.000,- merupakan sisa mati, karena dibayarkan sesuai biaya terhadap barang yang diusulkan untuk diperbaiki.
11. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dengan dana sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tidak ada perubahan, ini dilaksanakan melalui lelang dengan harga satuan. realisasi keuangan sebesar Rp. 271.781.700,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau (87,67%) dengan fisik 100%.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 38.218.300,- merupakan sisa mati, karena dibayarkan sesuai dengan harga satuan dalam kontrak dikarenakan banyak pegawai yang sudah pindah kembali ke Kabupaten/Kota dan telah pensiun.
12. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 190.924.200,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), Setelah Perubahan Menjadi Rp. 283.142.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 184.661.100,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) atau (65,22%) dengan fisik 100%.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 98.480.800,- merupakan sisa mati.
13. Kegiatan Pengembangan Kemitraan Kehutanan dengan dana sebesar Rp. 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 175.870.899,- (Seratus Tujuh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau (88,38%) dengan fisik 100%.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 23.129.101,- merupakan sisa mati kegiatan berupa BBM, efisiensi penginapan dan makan minum kegiatan.

14. Pembangunan sarana prasarana operasional KPH -Resort (DAK) dengan dana sebesar Rp. 6.507.010.000 (Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.214.225.725,- (Lima Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 80.13 % dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 1.292.784.275,- merupakan sisa tender kontrak.

15. Konservasi sumber daya genetik dengan dana sebesar Rp. 120.750.000 (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 89.031,200,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau 73,73% dengan realisasi fisik 93,64%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 31.718.800 merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, dan sisa Uang Harian Perjalanan Dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standart biaya yang dibawahnya. realisasi fisik kegiatan yang tidak mencapai 100 % merupakan akibat tidak dapat dilaksanakannya sub kegiatan pemeliharaan tanaman tahun N-1 karena kondisi penanaman baru selesai pada bulan Desember.

16. Pengembangan kualitas bibit dan benih tanaman hutan dengan dana sebesar Rp. 3.383.216.335,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.402.554.100 (Dua Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) atau 71,01 % dengan realisasi fisik 78.02%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 980.662.235,- merupakan sisa kontrak lelang pengadaan bibit dan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, dan sisa uang harian perjalanan dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang dibawahnya. Kondisi fisik yang tidak mencapai 100% merupakan akibat tidak dapat dilaksanakannya beberapa sub kegiatan akibat ketersediaan barang yang susah sehingga tidak ada yang mengajukan tawaran saat dilakukan lelang.

17. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan memiliki nilai anggaran setelah perubahan Rp. 198.718.350,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.777.230,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar (89,97%) dan realisasi fisik 100%.
- Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 19.941.120,- yang merupakan merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, Makan Minum Rapat, dan sisa Uang Harian Perjalanan Dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standart biaya yang dibawahnya yang tidak mempengaruhi keluaran dan Hasil Kegiatan secara fisik.
18. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan dengan dana sebesar Rp. 558.986.800,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 462.096.766,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) atau (82,67%) dengan realisasi fisik 100%.
- Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 96.890.034,- merupakan sisa sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang dibawahnya yang tidak mempengaruhi keluaran dan Hasil Kegiatan secara fisik.
19. Pengembangan hutan mangrove dengan dana sebesar Rp. 108.743.500 (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 92.253.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau (84,84%) dengan realisasi fisik 95,71%.
- Sisa anggaran sebesar Rp. 16.490.500,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang ada dibawahnya. Sedangkan realisasi

fisik tidak mencapai 100% merupakan tidak dapat direalisasikannya salah satu sub kegiatan berupa pertemuan dengan kelompok tani.

20. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dengan dana sebesar Rp. 262.450.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 235.183.900,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau (89,61%) dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 27.266.100,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang ada dibawahnya.

21. Penyiapan perhutanan sosial merupakan kegiatan dari DBH DR dengan anggaran Rp. 689.534.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 578.664.800,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau (83,92%) dengan realisasi fisik 100%.

sisa anggaran sebesar Rp. 110.869.200,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, Makan Minum Rapat, dan sisa Uang Harian Perjalanan Dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang ada dibawahnya yang tidak mempengaruhi keluaran dan Hasil Kegiatan secara fisik.

22. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan dana sebesar Rp. 1.010.000.000,- (Satu Miliar Sepuluh Juta Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.201.005,- (Satu Miliar Dua Ratus Satu Ribu Lima Rupiah) atau (99.03%) dengan fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 9.798.995,- merupakan sisa mati berupa BBM, efisiensi penginapan, makan minum kegiatan serta sisa mati honor narasumber Pelatihan dan Workshop.

23. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola Kawasan dengan dana sebesar Rp. 306.175.475,- (Tiga Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 268.412.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) atau (87,67%) dengan fisik 100%.

Sisa anggaran Rp. 37.763.475,- merupakan sisa mati berupa BBM, efisiensi penginapan, makan minum kegiatan.

24. Kegiatan Identifikasi, Sosialisasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial dengan dana sebesar Rp. 243.200.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp. 192.756.550,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau (79,26%) dengan fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 50.443.450,- merupakan sisa mati dari anggaran BBM, efisiensi penginapan, makan minum kegiatan dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dinas serta sisa mati Belanja Jasa Kantor untuk kegiatan Workshop Hutan Adat.

25. Pengendalian perencanaan dan tata hutan dengan dana sebesar Rp. 446.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 349.909.450,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 78,46% dengan fisik 100%.

Sisa anggaran Rp. 96.090.550,- merupakan sisa-sisa anggaran dari penghematan/ efisiensi dari belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, Makan Minum Rapat, dan sisa Uang Harian Perjalanan Dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standart biaya yang dibawahnya yang tidak mempengaruhi keluaran dan Hasil Kegiatan secara fisik.

26. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat dengan dana sebesar Rp. 82.452.190,- (Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 74.066.850,- (Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau (89,83%) dengan fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 8.385.340,- merupakan sisa mati kegiatan berupa BBM, efisiensi penginapan, biaya transport Kapal di Mentawai dan makan minum kegiatan

27. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp. 1.201.500.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.003.444.700,- (Satu Milyar Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau (83,52%) dengan realisasi fisik 90%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 198.055.300,- dan tidak tercapainya realisasi fisik kegiatan 100 % dikarekan adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/ direalisasikan karena kegiatannya merupakan kegiatan yang bersifat situasional seperti pemadaman kebakaran hutan, groundcheck lokasi bekas kebakaran hutan.

28. Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode dengan dana sebesar Rp. 491.039.500,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 283.698.450,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau (57,78%) dengan realisasi fisik 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 207.341.050 merupakan efisiensi belanja penggandaan, bbm, makan minum rapat dan makan minum kegiatan, efisiensi penginapan, dan biaya transport.

29. Monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan dengan dana Rp. 88.831.250,- (Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi 8.694.750,- (Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau (9,79%) dengan realisasi fisik 10%.

Sisa anggaran Rp. 80.136.500,- dan tidak tercapainya realisasi fisik 100% merupakan kegiatan yang bersifat situasional yang tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya kejadian yang membutuhkan/ memerlukan kegiatan tersebut.

30. Ground check Hotspot dan/atau informasi kebakaran hutan dengan dana sebesar Rp. 61.812.500,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 412.500,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau (0,67%) dengan realisasi fisik 1 %.

Sisa anggaran Rp. 61.400.000,- tidak tercapainya realisasi fisik 100% merupakan kegiatan yang bersifat situasional yang tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya kejadian yang membutuhkan/memerlukan kegiatan tersebut.

31. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp. 271.420.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 26.680.850,- (dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau (9,83%) dengan realisasi fisik 10%.

Tidak terealisasinya anggaran dan fisik kegiatan 100% dikarenakan kegiatan bersifat situasional atau kegiatan dapat dilaksanakan jika ada terjadi kejadian atau kebakaran hutan dan lahan.

32. Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain dengan dana Rp. 245.878.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 151.875.450 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau (61,77%) dengan realisasi fisik 96,97%

Tidak tercapainya realisasi fisik kegiatan dan keuangan sebesar 100% merupakan tidak dapat dilaksanakannya salah satu sub kegiatan yang ikut berdampak tidak dapat direalisasikannya keuangan serta adanya efisiensi terhadap bahan bakar, makan minum kegiatan dan makan minum rapat serta penghematan belanja pengadaan.

33. Patroli terpadu bersama masyarakat dan pihak/ instansi terkait lainnya dengan dana sebesar Rp. 553.251.250,- (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 490.943.500,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta

Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) atau (88,74%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Sisa anggaran sebesar Rp. 62.307.750 merupakan sisa-sisa belanja bahan bakar minyak, penggandaan, makan minum kegiatan, makan minum rapat dan biaya penginapan.

34. Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim dengan dana sebesar Rp. 137.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 122.343.623 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau (89,30%) dengan realisasi fisik kegiatan 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 14.656.387,- merupakan sisa-sisa belanja penggandaan, bahan bakar minyak, penginapan dan sisa transportasi kegiatan.

35. Pengendalian keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan dana sebesar Rp. 132.260.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 117.117.500,- (Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau (88,55%) dengan realisasi fisik kegiatan 100%.

Sisa Anggaran sebesar Rp. 15.142.500 merupakan sisa mati karena adanya efisiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan berupa Belanja ATK sebesar Rp. 180.000, belanja BBM sebesar 806.300, dan belanja perjalanan dalam daerah dan luar daerah dengan masing-masing rincian sebesar Rp.11.990.000,- dan Rp. 2.166.200,- yang merupakan sisa penginapan dan biaya transportasi.

36. Pengukuran simpanan karbon dengan dana sebesar Rp. 328.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 283.594.256,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau (86,46%) dengan realisasi fisik kegiatan 100%.

Sisa anggaran sebesar Rp. 44.405.744,- merupakan sisa-sisa belanja penggandaan, bahan bakar minyak, penginapan, makan minum kegiatan dan makan minum rapat.

37. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dengan dana sebesar Rp. 101.573.500,- (Seratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 129.085.219,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau (85,31%) dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 22.223.531,- merupakan sisa-sisa belanja bahan bakar minyak kegiatan dan Penginapan.
38. Penyusun neraca sumberdaya hutan dengan dana sebesar Rp. 119.690.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 103.345.900,- (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau (86,34%) dengan realisasi fisik kegiatan 100 %.  
Sisa anggaran sebesar Rp. 16.344.100,- merupakan penghematan terhadap belanja penggandaan peta dan penginapan serta adanya BBM perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasikan karena keterbatasan kendaraan dinas dalam pelaksanaan kegiatan.
39. Pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai dengan dana sebesar Rp. 581.330.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terealisasikan sebesar Rp. 483.280.520,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah atau (83,13%) dengan realisasi fisik kegiatan 100%.  
Sisa dana sebesar Rp. 98.049.480 merupakan sisa-sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas berupa penginapan dan uang harian pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan jabatan/ golongan dalam tim dan sisa pembayaran honorarium tenaga ahli untuk kegiatan.
40. Pembuatan tanamanan (DAK) dengan dana sebesar Rp. 5.271.196.992,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) yang terealisasi sebesar Rp. 4.715.157.720,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) atau (89,45%) dengan realisasi kegiatan 90,79 %.

Tidak tercapainya realisasi fisik dan keuangan sebesar 100% dikarenakan adanya 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya konflik masyarakat pada lokasi pelaksanaan kegiatan yang berimbas tidak dapat terealisasi juga keuangan dari kegiatan tersebut.

41. Pembangunan DAM Penahan dengan dana sebesar Rp. 438.613.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 384.089.336,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) atau (87,57%) dengan realisasi fisik kegiatan 91,67%.

Tidak terealisasinya fisik dan keuangan kegiatan 100% dikarenakan adanya 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan permasalahan lokasi kegiatan sehingga realisasi keuangan juga tidak dapat terealisasi.

42. Pembangunan sarana prasarana operasional KPH-Wisata (DAK) dengan dana sebesar Rp. 747.960.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan realisasi kegiatan 0%. Tidak terealisasinya kegiatan ini terkendala pada izin lingkungan.

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2018 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

## **B. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)**

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi melalui DIPA Bagian Anggaran 029 Tahun 2018 No. SP.DIPA-029.01.3.080053/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp 836.706.000,- yang terdapat dalam 1 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi serta 1 output yaitu presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK sebesar 93%.

Alokasi dana tersebut di atas terealisasi sebesar Rp 791.697.494,- atau sebesar 94,62% dengan realisasi fisik sebesar 98,29%. Dana yang tidak terealisasi sebesar Rp 47.950.887,-. Rincian alokasi dan realisasi dana masing-masing output dan sub output dapat dilihat pada Tabel 3. di bawah ini.

No. Kode	Program/Sub Program/ Kegiatan	Vol	Satuan	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
					Fisik (%)	Keuangan	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
029.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	-		836,706,000	98.11	791,697,494	94.62	45,008,506
5369	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	-		836,706,000	98.11	791,697,494	94.62	45,008,506
5369	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK [Base Line]	93.00	%	836,706,000	98.11	791,697,494	94.62	45,008,506
75	Dukungan Pencapaian Sasaran Strategis (Dekonsentrasi)	-		836,706,000	98.11	791,697,494	94.62	45,008,506
A	Konsultasi/Koordinasi Operasional KPH	-		148,459,000	99.02	141,340,000	95.20	7,119,000
B	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi oleh Tim Provinsi	-		119,389,000	100.00	110,351,619	92.43	11,979,762
C	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	-		106,544,000	90.39	86,855,600	81.52	19,688,400
D	Sekolah Lapangan Penyuluhan Kehutanan Untuk Mendukung Perhutanan Sosial (HKm)	-		67,640,000	100.00	66,845,000	98.82	795,000
E	Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan	-		236,160,000	100.00	236,160,000	100.00	-
F	Administrasi Kegiatan	-		158,514,000	97.41	150,145,275	94.72	8,368,725
	<b>JUMLAH</b>			<b>836,706,000</b>	<b>98.11</b>	<b>791,697,494</b>	<b>94.62</b>	<b>47,008,506</b>

Tabel 3. Alokasi Dana dan Realisasi serta Sisa Dana Kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Tahun 2018.

Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan tahun kedua (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2016-2021 yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan kawasan hutan agar berfungsi optimal sesuai peruntukannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Pembangunan kehutanan Tahun 2018 menekankan pada upaya pemantapan kawasan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan serta mitigasi perubahan iklim, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan pemantapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan kehutanan. Keenam fokus tersebut merupakan

penjabaran dari 5 kebijakan prioritas pembangunan kehutanan Sumatera Barat yang terdapat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021.

Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan (nagari).

Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan bukan kayu (*Non Timber Forest Product/NTFP*) dan jasa lingkungan juga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.

Pembangunan Kehutanan Tahun 2018 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersumber Anggaran dari APBD dan APBN digunakan untuk mencapai 4 (empat) sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Capaian terhadap 4 sasaran tersebut rata-rata mencapai 126,43 %. Kinerja tersebut diukur melalui perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Pencapaian IKU Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
		Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	82%	92,93%	113,33
		Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	82%	76,26%	93
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I</b>					<b>102,11</b>
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	1.09%	1.10 %	100,92
		Persentase penurunan laju kerusakan hutan	10%	19,22 %	192,20
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	45%	86,32 %	191,82
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II</b>					<b>161,65</b>
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	11.68%	16,62 %	142.29
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III</b>					<b>142,29</b>

4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	94,36	99,33
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV</b>					<b>99,67</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV</b>					<b>126.43</b>

Dari Tabel diatas capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian IKU “ Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya” terealisasi 100%. Indikator tersebut diatas dihitung dengan formula luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada Tahun 2018 di bagi dengan luas kawasan hutan yang dibebani izin pada Tahun 2018 dikalikan angka 100%. Pencapaian indikator kinerja ini di dukung oleh Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan dan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya” Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/ Hutan Tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sesuai dengan perijinan yang di berikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pada tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 133 unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera Barat yang terdiri dari 23 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 6 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 45 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 38 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 122 unit/ perusahaan yang memanfaatkan dan

menggunakan kawasan hutan tersebut diatas berdasarkan hasil evaluasi tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK" memiliki target sebesar 82%, terealisasi sebesar 92,93% dengan tingkat capaian 113,30% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan formula membagi realisasi produksi HHK dan HHBK Tahun 2018 dengan target produksi HHK dan HHBK dikalikan angka 100%. Pada Tahun 2018 realisasi produksi HHK dan HHBK terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 92,93% dengan uraian adalah sebagai berikut:

- a) Persentase realisasi produksi kayu terhadap target : 76.56 %
- b) Persentase realisasi produksi acasia terhadap target : 2.79 %
- c) Persentase realisasi produksi manau terhadap target : 38.46 %
- d) Persentase realisasi produksi tabu-tabu terhadap target : 73.25 %
- e) Persentase realisasi produksi aalet terhadap target : 277.67 %
- f) Persentase realisasi produksi getah karet terhadap target : 167.18 %
- g) Persentase realisasi produksi getah pinus terhadap target : 107.57 %

3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) "Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan" memiliki target sebesar 82%, terealisasi sebesar 76,26% dengan tingkat capaian 93%. Indikator tersebut diatas dihitung dengan formula membagi realisasi penerimaan Negara sektor kehutanan Tahun 2018 dengan target penerimaan Negara sektor kehutanan Tahun 2018 dikalikan angka 100%. Untuk mencapai target kinerja indikator "Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan.

PNBP sektor kehutanan harus dimonitor agar sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perijinan yang berlaku. Pada tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBP sektor kehutanan di Sumatera Barat. Tahun 2018 realisasi PNBP terhadap target terealisasi sebesar 76,26% dengan uraian adalah sebagai berikut:

a. Target PSDH tahun 2018 sebesar	: Rp. 12.068.475.050
b. Target DR tahun 2018 sebesar	: <u>Rp. 31.294.059.225</u>
<b>Total</b>	<b>: Rp. 43.362.534.275</b>
a. Realisasi PSDH tahun 2018 sebesar	: Rp. 9.322.667.752
b. Realisasi DR tahun 2018 sebesar	: <u>Rp. 23.746.372.520</u>
<b>Total</b>	<b>: Rp. 33.069.040.272</b>

4. Capaian Indikator Kinerja Utama "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" diukur dengan rumus angka 0.8 dikalikan angka jumlah tanaman yang ditanam pada tahun 2013 (setelah dikonversikan ke luas dalam satuan hektar dibagi dengan luas lahan kritis dikalikan angka 100%. Angka 0,8 adalah asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam pada Tahun 2013. Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanaman yang dilakukan pada Tahun 2013. Hal ini sesuai dengan saran tim Kemenpan-RB yang menyarankan agar penurunan lahan kritis dilakukan dengan menghitung luasan kawasan hutan dan lahan hasil reboisasi di dalam dan di luar kawasan hutan dan lahan pada lima tahun yang lalu, mengingat lahan kritis tidak mungkin tertangani pada saat penanaman. Pohon dengan umur lima tahun dianggap telah memiliki kanopi tajuk yang cukup untuk berkontribusi menangani pengurangan lahan kritis. Untuk itu indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2018 dihitung dengan menghitung luasan hasil penanaman pada Tahun 2013. Luas penanaman yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD dan DAK Tahun 2013 adalah seluas 5.250 Ha dan jika dengan asumsi dari penanaman tersebut tumbuh hanya 80% maka diperoleh jumlah tanaman yang tumbuh pada Tahun 2018 adalah 4.200 Ha. Pada Tahun 2018 dilakukan monitoring dan evaluasi hasil penanaman Tahun 2013 tersebut, luas hutan dan lahan yang ditumbuhi tanaman hutan hasil penanaman Tahun 2013 adalah 4.226 Ha. Jika angka 4.226 Ha kita bagi dengan angka luas lahan kritis yaitu 630.695 Ha kemudian untuk mengetahui persentasenya kita kalikan dengan angka 100% maka diperoleh angka 0,67%. Angka 0,67% ditambahkan dengan persentase penurunan lahan kritis pada Tahun

2017 sebesar 0,43% inilah yang menjadi hasil capaian indikator "Persentase penurunan luas lahan kritis" pada Tahun 2018 yaitu sebesar 0,10%. Artinya dengan diketahui jumlah pohon yang masih hidup dan tumbuh baik hingga Tahun 2018 dari hasil penanaman lima tahun yang lalu yaitu 4.226 Ha pada Tahun 2018 (setelah dikonversikan ke luas dengan satuan hektar) maka dapat diketahui bahwa hasil penanaman lima tahun yang lalu tersebut dapat mengurangi luas lahan kritis hingga Tahun 2018 karena pohon dengan usia lima tahun dianggap telah mampu melaksanakan fungsinya sebagai penyangga ekologi dan ekosistem dengan baik.

5. Indikator Kinerja Utama "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" diukur dengan menghitung/ membandingkan tutupan hutan tahun N-1 dengan tahun N. laju kerusakan hutan pada tahun 2018 adalah 12.117 ha/tahun, ini dapat diketahui dengan luas tutupan hutan tahun 2016 adalah 1.922.146 ha dikurang dengan luas tutupan hutan tahun 2018 adalah 1.897.911 ha, selisih tutupan hutan tahun 2016 dengan 2018 dibagi dengan 2 (dua) maka didapatkan laju kerusakan hutan pertahun seluas 12.117 ha/ tahun. Realisasi dari itu pada tahun 2018 adalah 19,22 % ini dihitung dengan membandingkan baseline/ angka dasar laju kerusakan pada tahun 2016 seluas 15.000 Ha di kurangi dengan laju kerusakan hutan tahun 2018 yaitu 12.117 ha kemudian dibagi dengan laju kerusakan hutan tahun 2016 dikalikan 100 %.
6. Indikator Kinerja Utama " Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*hot spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" diukur dengan menghitung penurunan titik panas (*hot spot*) di Tahun 2018 dibagi jumlah rerata titik panas (*hot spot*) pada periode lima tahun sebelumnya (2011-2015) dikalikan angka 100%. Upaya pengawasan dan pencegahan ini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran hutan dan Lahan (SATGAS DAMKARHUTLA) maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian target indikator sasaran ini. Pengaruh iklim dan curah hujan sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja ini. Hasil pantauan titik api (*hot spot*) di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan sangat terpengaruh dengan kondisi

musim/iklim yang erat kaitannya dengan isu pemanasan global yang mendorong adanya wacana dalam perdagangan karbon (*Carbon Trade*). Skenario penurunan titik panas (*hot spot*) dimulai dengan angka 424, angka ini merupakan angka rerata titik *hot spot* Tahun 2011-2015.

Pada Tahun 2018 titik api mengalami penurunan dari 424 rerata titik pada Tahun 2011-2015 menjadi 58 titik api pada Tahun 2018, jika dilakukan perbandingan penurunan titik api dari rerata tahun sebelumnya (2011-2015) maka terjadi penurunan sebesar 86,32 % ini didapat rata-rata titik panas (*hot spot*) tahun 2011-2015 yaitu 424 titik api dikurang dengan 58 titik api (Tahun 2018) kemudian dibagi dengan 424 titik api dan dikalikan dengan angka 100%, maka didapat hasil 86,32%.

Tingginya realisasi capaian IKU ini disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca yang terjadi sepanjang Tahun 2018 disamping usaha-usaha pencegahan dan deteksi dini seperti pemasangan larangan pembakaran hutan, lahan dan kebijakan pembukaan kebun tanpa bakar.

7. Indikator Kinerja Utama "Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat/Kemitraan" diukur dengan luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N dibagi jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi dikalikan angka 100%. Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan dan Penguatan Forum PHBM Provinsi Sumatera Barat serta melaksanakan sosialisasi dan bimbingan kelembagaan, pengendalian PHBM.

Capaian IKU ini dapat terealisasi sebesar 16,62% dari target sebesar 11,68%. Peningkatan perkembangan yang signifikan di tiga tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait yang tergabung dalam kelompok kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat terutama fasilitasi dan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat yang berkolaborasi dengan penyuluh kehutanan dan tenaga pendamping lainnya.

Faktor lain yang mendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di kurun waktu 2018 adalah dengan mendorong percepatan fasilitasi usulan perhutanan sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi progres fasilitasi usulan, workshop fasilitasi usulan, Rapat Koordinasi (Rakor) Pokja, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik perluasan dan pengembangan usaha, pelatihan penanganan konflik tenurial, pengukuran karbon, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktek praktek pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di Perhutanan sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

8. Capaian Indikator Kinerja Utama "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017.
9. Capaian Indikator Kinerja Utama "Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan", diukur dengan menghitung jumlah realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dilaporkan dan dievaluasi setiap bulannya dibagi dengan angka dua dan dikalikan dengan angka 100%.

Alokasi keuangan pada APBD Perubahan dalam rangka mencapai sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kehutanan Provinsi Barat adalah sebesar Rp 103.168.994.702,- dan hingga bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 92.870.576.872,- atau 90,02%.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2018 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya.

Namun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kedepannya akan terus melaksanakan perbaikan untuk bisa mencapai target kinerja yang optimal melalui beberapa kebijakan diantaranya adalah:

1. Melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di Kabupaten/ Kota.
2. Peningkatkan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, sosialisasi dan lain-lain.
3. Melengkapi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarpras pemadaman kebakaran.
4. Mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/ lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja perhutanan sosial.
5. Melakukan percepatan pengukuhan UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Melakukan Upaya percepatan pelaksanaan penggunaan DBH-DR sesuai aturan yang berlaku.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Pembangunan Kehutanan sebesar Rp. 23.020.982.989,- dan setelah dirasionalisasi menjadi Rp. 21.783.148.204,- yang berasal dari dana APBD dan dari dana dekonsentrasi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebesar Rp. 836.706.000,-, dari dana DBH-DR sebesar Rp. 22.192.968.700,-, dan dari dana DAK sebesar Rp. 13.276.000.000,-.

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai empat sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Empat sasaran tersebut adalah:

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat.
4. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 10. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11. berikut ini.

Tabel. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
		Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	82%	92,93	113,33
		Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	82%	76,26	93
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I</b>					<b>102.11</b>
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	1,09%	1.10	100.92
		Persentase penurunan luas kerusakan hutan	10 %	19,22	192,20
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	45 %	86.32	191.82
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II</b>					<b>161.65</b>
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	8.50%	16.62	142.29
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III</b>					<b>142.29</b>
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	94.36	99.33
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV</b>					<b>99.67</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV</b>					<b>126.43</b>

Sumber: Diolah dari data Primer, penetapan kinerja dan money Pembangunan kehutanan 2018

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja menunjukkan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2018 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 131.58 % yang termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil (sesuai bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target). Capaian realisasi indikator tertinggi adalah "Persentase Penurunan Jumlah *Hot Spot* dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" hal ini disebabkan pada Tahun 2018 kondisi cuaca dan iklim di Sumatera Barat tidak terlalu panas dan sering hujan.

Hasil pencapaian kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel diatas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan diatas merupakan hasil realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat , UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH).

Capaian kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel T-C.30. (terlampir).

### **2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu degradasi dan deforestasi hutan dan lahan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan kehutanan dikaitkan dengan perkembangan tata ruang wilayah dan dampaknya pada beberapa periode yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Fungsi dan Peruntukannya merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan seluas  $\pm$  2.380.057 Ha atau 56,27% dari luas wilayah Sumatera Barat  $\pm$  4.229.730 Ha dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung ( $\pm$  791.671 Ha) dan Hutan Produksi ( $\pm$  360.608 Ha) sangat rawan terhadap penyalahgunaan kawasan hutan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap batas kawasan hutan Negara akan menyebabkan kerawanan terjadinya illegal logging dan perambahan sehingga perlu penataan batas kawasan hutan dan pemeliharaan batas kawasan hutan yang telah ditata batas. Instansi atau perusahaan tertentupun yang melakukan kegiatan di luar kehutanan pada kawasan hutan juga memiliki potensi untuk merusak hutan jika mereka tidak mengetahui ketentuan dan aturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan. Jika hal ini berlanjut dapat dipastikan keberadaan hutan Sumatera Barat tidak dapat dipertahankan sebagai penyangga ekosistem secara baik.

Dari 100% panjang kawasan hutan yang harus dipelihara sampai dengan Tahun 2015, baru 7,52% yang telah dipelihara. Artinya masih ada 92,48% panjang batas kawasan yang belum dipelihara. Ini merupakan tugas berat Dinas Kehutanan untuk memelihara agar batas kehutanan jelas di lapangan sebagai salah satu upaya mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Hal lain yang menentukan terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk selalu mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kawasan hutan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Barat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

2. Daya dukung daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam tergantung pada banyak hal diantaranya adalah turunnya luas lahan kritis dan turunnya luas kerusakan hutan. Hal ini akan mempengaruhi angka indeks tutupan hutan menjadi salah satu variabel dalam pengukuran angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menurunkan luas lahan kritis melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 11.996 Ha dari angka awal Lahan kritis pada tahun 2012 seluas 372.386 Ha. Realisasi ini melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu menurunkan luas lahan kritis 10.000 Ha dalam kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.4/V-DAS/2015 Tentang Penetapan Peta Dan Data Hutan Dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 total lahan kritis Di Provinsi Sumatera Barat seluas 630.695 Ha. Angka ini perubahan karena adanya perbedaan kriteria dalam menentukan kategori lahan kritis. Berdasarkan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus melakukan upaya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan di dalam wilayah kelola KPH.
4. Pada lima Tahun terakhir luas kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat sekitar 9.400 Ha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah illegal logging dan kebakaran hutan. Dalam periode lima tahun (2011-2015) kasus illegal logging yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat berhasil dikurangi sebanyak 36 kasus dari 103 kasus berkurang menjadi 67 Kasus.  
Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang kasus illegal logging tetap ada dan cenderung meningkat hal ini disebabkan karena desakan ekonomi dan masa peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke provinsi sebagai dampak implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Untuk itu perlu pengamanan dan perlindungan terhadap kawasan hutan secara kontinyu agar kasus illegal logging dapat tertangani.

Penanggulangan kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan sampai dengan Tahun 2015 yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menurunkan jumlah titik panas (hot spot) dari angka sebelumnya. Jumlah titik panas yang sudah berhasil diturunkan dari 545 titik pada tahun 2011 turun menjadi 203 pada Tahun 2015 (sebesar 84,15%), upaya penurunan jumlah titik panas ini sudah dari melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 20%. Pemantauan titik panas (hotspot) merupakan upaya awal untuk mendeteksi kebakaran hutan. Luas kebakaran hutan tahun 2011-2015 berfluktuatif, yang terendah seluas 2 Ha pada tahun 2013 yang tertinggi seluas 1.309,5 Ha pada tahun 2011. Berdasarkan kecenderungan tersebut, maka upaya penurunan titik panas (hotspot) ini perlu untuk dilakukan.

5. Produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan pengelolaannya dan pemasarannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan hutan dimana pemegang ijin pengelolaan dan perusahaan hutan diberi kewenangan untuk mengeluarkan hasil produksi hasil hutan sendiri. Tercatat pada dua tahun terakhir sejak kebijakan tersebut diberlakukan capaian target produksi dan pendapatan kehutanan terus menurun yaitu 93% pada Tahun 2014 dan turun menjadi 81% pada Tahun 2015 sedangkan pada tahun 2011 s/d 2013 capaian target produksi dan pendapatan hasil hutan selalu berada diatas angka 100%. Hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja pengelola hutan di Sumatera Barat.
6. Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang telah berubah dari pengelolaan hutan oleh *cooperate* menjadi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat merupakan peluang besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya

hutan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial. Sumatera Barat telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan dalam bentuk rimbo larangan, hutan simpanan, parak hutan lepas (parak hutan lapeh) yang merupakan modal dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sumatera Barat telah memiliki Road Map Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan target 500.000 Ha hutan dapat diberikan hak kelolanya kepada masyarakat hutan di Sumatera Barat hingga Tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penentuan isu-isu strategis pada Dinas Kehutanan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW Substansi kehutanan dan Penyiapan Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.

- c. Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, sertapeningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).
- d. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.
- e. Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBP dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, HHBK serta ekspor melalui perbaikan perijinan, PHPL, SVLK, penataan industri dan cluster industries, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
- f. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
- g. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro dan Pembangunan bidang kehutanan melalui forum koordinasi antara Institusi yang menangani bidang kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### 2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Permasalahan yang dihadapi saat ini dan merupakan kondisi pembangunan kehutanan di Sumatera Barat antara lain :

1. Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi.

2. Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan) belum seluruhnya diakui oleh para pihak/ masyarakat.
3. Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
4. Belum tersedianya data kondisi dan potensi kawasan hutan (baik kayu dan non kayu) sebagai dasar penyusunan rencana makro kehutanan.
5. Kondisi kekritisn DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Sumatera Barat.
6. Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.
7. Belum optimalnya penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan.
8. Rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan daya beli masyarakat sekitar hutan.
9. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan.
10. Peran Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan belum optimal Persepsi, motivasi dan partisipasi kesadaran lingkungan pemangku kepentingan masih rendah.
11. Belum terciptanya sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan
12. Masih terjadinya pencurian hasil hutan, illegal logging dan gangguan keamanan hutan lainnya.

### 2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Konflik tenurial.
2. Penduduk miskin di dalam dan sekitar hutan.

3. Tingginya kebutuhan lahan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan.
5. Tingginya degradasi dan deforestasi.
6. Belum mantapnya kawasan hutan.
7. Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan pengelolaan hutan.
2. Tersedianya anggaran pembangunan.
3. Kawasan hutan yang luas.
4. Peraturan perundangan bidang kehutanan.
5. Tingginya permintaan hasil hutan.
6. Minat investasi di bidang kehutanan.
7. Perhatian dunia internasional.
8. Potensi Sumber Daya Hutan cukup besar.

### 2.3.3 Rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2020.

Atas penilaian hasil identifikasi faktor-faktor tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, kemudian disusun Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai langkah-langkah strategis yang diperlukan sebagaimana Tabel 2.3.3.1. berikut ini:

**Tabel 2.3.3.1. Langkah-Langkah Pencapaian Sasaran Strategis**

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Pemantapan Kawasan Hutan	Percepatan Proses Penyelesaian review RTRW substansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemantapan Kawasan Hutan (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan</li> <li>b. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Agam Raya</li> <li>c. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pasaman Raya</li> <li>d. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Sijunjung</li> <li>e. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya</li> <li>f. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pesisir Selatan</li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Hulu Batang Hari</li> <li>h. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Limapuluh Kota</li> <li>i. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Solok</li> <li>j. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan</li> <li>k. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai</li> <li>l. Supervisi pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan</li> <li>m. Sosialisasi, Identifikasi, Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial</li> <li>n. Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan</li> </ul>
	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan PNBK Sektor Kehutanan</li> <li>b. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya</li> <li>c. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya</li> <li>d. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung</li> <li>e. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya</li> <li>f. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan</li> <li>g. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH limapuluh Kota</li> <li>h. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan</li> <li>i. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok</li> <li>j. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai</li> <li>k. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari</li> <li>l. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan</li> <li>m. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Agam raya</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>n. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Pasaman Raya</li> <li>o. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Sijunjung</li> <li>p. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Dharmasraya</li> <li>q. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Pesisir Selatan</li> <li>r. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari</li> <li>s. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Limapuluh Kota</li> <li>t. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Bukit Barisan</li> <li>u. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Solok</li> <li>v. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Mentawai</li> <li>w. Pengembangan Kemitraan Kehutanan</li> <li>x. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya</li> <li>y. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya</li> <li>z. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung</li> <li>å. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya</li> <li>ä. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari</li> <li>ö. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan</li> <li>aa. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota</li> <li>bb. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan</li> <li>cc. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok</li> <li>dd. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai</li> </ul>
<p>Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat</p>	<p>Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim</p>	<p>Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p>	<p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam (APBD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan</li> <li>b. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Agam Raya</li> <li>c. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pasaman Raya</li> <li>d. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Sijunjung</li> <li>e. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Dharmasraya</li> <li>f. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pesisir Selatan</li> <li>g. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Limapuluh Kota</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari</li> <li>i. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Solok</li> <li>j. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan</li> <li>k. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Mentawai</li> <li>l. Pengembangan Ekwisata dan Jasa Lingkungan</li> <li>m. Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan</li> <li>n. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA</li> <li>o. Pengembalian Dampak Perubahan Iklim</li> <li>p. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya</li> <li>q. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya</li> <li>r. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung</li> <li>s. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya</li> <li>t. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan</li> <li>u. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok</li> <li>v. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota</li> <li>w. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari</li> <li>x. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan</li> <li>y. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai</li> <li>z. Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem</li> <li>aa. Pengukuran Simpanan Karbon</li> </ul>
	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Penyediaan bibit dan peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Diluar Kawasan Hutan</li> <li>b. Evaluasi keberhasilan penanaman N-5</li> <li>c. Pengendalian Pengelolaan DAS</li> <li>d. Penyusunan Dokumen RTn RL dan RPRL.</li> <li>e. Pembuatan Bibit Tanaman Hutan</li> <li>f. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan</li> <li>g. Konservasi Sumberdaya Genetik.</li> </ul>
			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Agam Raya</li> <li>b. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Pasaman Raya</li> <li>c. Pencegahan dan pengendalian</li> </ul>

				<p>kebakaran hutan dan lahan pada KPH Sijunjung</p> <p>d. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Dharmasraya</p> <p>e. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Hulu Batang Hari</p> <p>f. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Solok</p> <p>g. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Pesisir Selatan</p> <p>h. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Limapuluh Kota</p> <p>i. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Bukit Barisan</p> <p>j. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPH Mentawai</p> <p>k. Supervisi Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p>
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Pemberdaya-an masyarakat sekitar hutan	Peningkatan kelompok masyarakat pengelola hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan (APBD)	<p>a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HTR, HD dan HR Kemitraan</p> <p>b. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Agam Raya</p> <p>c. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Pasaman Raya</p> <p>d. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Sijunjung</p> <p>e. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Dharmasraya</p> <p>f. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Hulu Batang Hari</p> <p>g. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Solok</p> <p>h. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Pesisir Selatan</p> <p>i. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Limapuluh Kota</p> <p>j. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Bukit Barisan</p> <p>k. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan pada KPH Mentawai</p> <p>l. Penguatan Forum Komunikasi</p>

				<p>PHBM Sumatera Barat</p> <p>m. Pengembangan Hutan Mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya</p> <p>n. Pengembangan Hutan Mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya</p> <p>o. Pengembangan Hutan Mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan</p> <p>p. Pengembangan Hutan Mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan</p> <p>q. Pengembangan Hutan Mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai</p> <p>r. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan</p> <p>s. pengembangan hutan mangrove Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan</p> <p>t. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya</p> <p>u. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya</p> <p>v. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung</p> <p>w. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok</p> <p>x. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya</p> <p>y. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari</p> <p>z. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota</p> <p>ã. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan</p> <p>ä. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan</p> <p>ö. Peningkatan kelas kelompok tani hutan</p>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan tata kelola organisasi	<p>Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja – BB</p> <p>Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan</p>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD)	<p>a. Penyediaan Jasa Surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Jaminan BMD</p> <p>d. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor</p> <p>e. Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>f. Penyediaan Barang Cetak &amp; Penggandaan</p> <p>g. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>h. Penyediaan Bahan Bacaan, PerUU</p> <p>i. Penyediaan Makanan dan Minuman</p> <p>j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah</p> <p>k. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi</p> <p>l. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur</p>

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Meubelier</li> <li>b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess</li> <li>d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional</li> <li>f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan</li> <li>h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan</li> </ul>
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUU</li> </ul>
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</li> </ul>
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>b. Penatausahaan Keuangan SKPD</li> <li>c. Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD</li> <li>d. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD</li> <li>e. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD</li> </ul>
			Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan data dan informasi kehutanan</li> <li>b. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan</li> <li>c. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan</li> </ul>

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil rancangan awal RKPD belum memenuhi hasil analisis kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Tahun 2020. Ini disebabkan karena adanya pembentukan UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten/Kota. Pembentukan UPTD KPH bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerjanya. Saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki 11 UPTD Dinas Kehutanan yang terdiri dari UPTD BSPTH (Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan) dan 10 (sepuluh) UPTD KPH Lingkup

Dinas Kehutanan yang sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sehingga untuk mengakomodir semua itu, harus adanya penyesuaian terhadap Anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2020 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena isu bidang kehutanan antar wilayah dapat dikatakan serupa. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan yang akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang diakomodir terdiri dari 7 Program dan 120 kegiatan yaitu :

1. Program Pemantapan Kawasan Hutan, yang terdiri dari Kegiatan :
  - Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Agam Raya
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pasaman Raya
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Sijunjung
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pesisir Selatan
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Hulu Batang Hari
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Limapuluh Kota
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Solok

- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan
  - Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai
  - Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
  - Sosialisasi , identifikasi hutan adat dan penangan konflik tenurial
  - Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan
2. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, yang terdiri dari kegiatan :
- Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari
  - Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari

- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai
  - Pengembangan Kemitraan Kehutanan
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, yang terdiri dari kegiatan :
- Pengamanan dan Perlindungan Hutan
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Agam Raya
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pasaman Raya
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Sijunjung
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Dharmasraya
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pesisir Selatan
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Limapuluh Kota
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Solok
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan
  - Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Mentawai
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya

- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
  - Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai
  - Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
  - Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
  - Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan
  - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
  - Pengukuran Simpanan Karbon
  - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, yang terdiri dari kegiatan :
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan
  - Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai
  - Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam, yang terdiri dari kegiatan :

- Pembuatan Bibit Tanaman Hutan.
  - Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.
  - Konservasi Sumber Daya Genetik.
  - Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan.
  - Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5.
  - Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL.
6. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan, yang terdiri dari kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Pasaman Raya.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Sijunjung.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Solok.
  - Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.
  - Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat.
  - Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya.
  - Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan.
  - Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya.

- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan.
  - Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai.
  - Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove.
  - Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
  - Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan.
  - Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan.
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan
  - Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
  - Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan

Pelaksanaan proses tersebut melibatkan masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dapat dilihat pada table T-C.32.

## ***BAB III***

### ***TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH***

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sasaran pokok arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat pada tahapan RPJM ke 5 (2016-2021) yang berkaitan erat dengan pembagunan kehutanan adalah bidang Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup yang difokuskan kepada Peningkatan kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan Nagari yang melaksanakan agroforestri serta pengembangan hutan rakyat dan tanaman industri.

Memperhatikan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang relevan dengan kondisi lima tahun kedepan yaitu :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industry, perdagangan, koperasi, UMKM dan Peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari 10 prioritas di atas, yang berkaitan erat dengan Pembangunan Kehutanan adalah prioritas nomor 10 yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan program strategis sebagai berikut :

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
- b. Program Perhutanan Sosial.
- c. Program Pemantapan Kawasan Hutan.
- d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
- g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

Selain melalui 7 (Tujuh) program strategis di atas, dukungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian sasaran tersebut di atas juga melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta program pendukung lainnya berupa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Secara teknis selain dukungan bagi pencapaian sasaran pokok arah kebijakan pembangunan pada RPJM ke 5 (Lima) dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan kehutanan Tahun 2020 oleh Dinas Kehutanan juga bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
2. Meningkatnya kinerja organisasi

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada tabel 5. berikut:

Tabel 5. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2020
1.	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100
			Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	%	84
			Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	%	84
		Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	2.21
			Persentase Penurunan Laju kerusakan hutan	%	14
			Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya	%	55
		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	18.03
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95

Dalam Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan dimaksud maka ditetapkanlah sasaran pembangunan kehutanan yang akan dicapai pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kawasan hutan dan potensi yang ada di dalamnya diakui secara legal dan aktual
2. Berkurangnya Kerusakan Hutan Melalui Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan serta adaptasi perubahan iklim
3. Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis.
4. Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
5. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm
6. Tersedianya data dan informasi untuk pembangunan kehutanan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020,

perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program.

Pada Tahun 2020 sesuai dengan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat direncanakan menjalankan 12 Program dengan total anggaran Rp. 27.724.000.000,- untuk menjalankan program tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 151 kegiatan. Uraian rencana program dan kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2020 dapat dilihat pada table T-C.31 sebagaimana terlampir pada lampiran Renja ini.

### **1. Program Pemantapan Kawasan Hutan**

Indikator kinerja utama program adalah :

Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

➤ Terpeliharanya batas kawasan hutan sepanjang 70 km.

- b. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya.

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di Wilayah Kelola Agam Raya 3 unit.

- c. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pasaman Raya.

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya 4 unit.

- d. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Sijunjung.

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Sijunjung 2 unit.

- e. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya.  
Indikator Kinerja kegiatan adalah :  
➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan diwilayah kelola KPH Dharmasraya 2 unit.
- f. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pesisir Selatan.  
Indikator Kinerja kegiatan adalah :  
➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan 1 unit.
- g. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Hulu Batang Hari.  
Indikator Kinerja kegiatan adalah :  
➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari 2 unit.
- h. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Limapuluh Kota.  
Indikator Kinerja kegiatan adalah :  
➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan diwilayah Kelola Limapuluh Kota 1 unit.
- i. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Solok.  
Indikator Kinerja kegiatan adalah :  
➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan diwilayah kelola KPH Solok 4 unit.
- j. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan.  
Indikator Kinerja kegiatan adalah :  
➤ Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan 8 unit.
- k. Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai.

- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalkan diwilayah kelola KPH Mentawai 2 unit.
- l. Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
  - Jumlah supervisi pelaksanaan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan 20 kali.
- m. Sosialisasi, Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial.
 

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

  - Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan 20 kali.
- n. Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan.
 

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

  - Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun 1 buku.

## **2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam**

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase penurunan laju kerusakan hutan.

Kegiatan-kegiatan :

### a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Kasus tindak pidana hutan yang ditindaklanjuti 5 Kasus.

### b. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Agam Raya.

- Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Agam Raya sebanyak 25 kali.

### c. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah KPH Kelola Pasaman Raya.

- Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya sebanyak 25 kali.

### d. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Sijunjung.

- Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Sijunjung sebanyak 15 kali.

- e. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.
  - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Dharmasraya sebanyak 15 kali.
- f. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.
  - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan sebanyak 15 kali.
- g. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota.
  - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota sebanyak 15 kali.
- h. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.
  - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari sebanyak 20 kali.
- i. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Solok.
  - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Solok sebanyak 15 kali.
- j. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
  - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan sebanyak 20 kali.
- k. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Mentawai.
  - Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan diwilayah kelola KPH Mentawai sebanyak 20 kali.
- l. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan  
Indikator Kinerja kegiatan adalah :
  - Pengembangan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi (satu) 1 lokasi.
- m. Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Peta Laju Kerusakan Hutan yang tersusun sebanyak 6 Peta.

n. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam sebanyak 450 orang.

o. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Indikator Kinerja kegiatan adalah :

- Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang terlaksana 1 laporan.

p. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi 1 lokasi.

q. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi 1 lokasi.

r. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi 1 lokasi.

s. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang dikonservasi 1 lokasi.

t. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang dikonservasi 1 lokasi.

u. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang dikonservasi 1 lokasi.

v. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Solok yang dikonservasi 1 lokasi.

w. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang dikonservasi 1 lokasi.

x. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang dikonservasi 3 lokasi.

y. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonservasi 1 lokasi.

z. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :

- Terbentuknya kawasan ekosistem esensial 1 unit.

aa. Pengukuran Simpanan Karbon.

Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :

- Tersedianya data simpanan karbon 20 petak.

### **3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan**

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015).

Kegiatan-kegiatan :

a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Agam Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Agam Raya sebanyak 20 Kali.

b. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya sebanyak 20 Kali.

c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Sijunjung.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Sijunjung sebanyak 20 Kali.
- d. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Dharmasraya.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Dharmasraya sebanyak 20 Kali.
- e. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pesisir Selatan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan sebanyak 20 Kali.
- f. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Hulu Batang Hari.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari sebanyak 20 Kali.
- g. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Solok.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Solok sebanyak 20 Kali.
- h. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Limapuluh Kota.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota sebanyak 20 Kali.
- i. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Bukit Barisan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan sebanyak 25 Kali.

- j. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Mentawai.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Mentawai sebanyak 20 Kali.

- k. Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah supervisi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 17 Kali.

#### **4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**

Indikator kinerja utama program adalah

- Persentase penurunan luas lahan kritis.
- Indek tutupan hutan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Terehabilitasinya lahan kritis di luar kawasan hutan 180 Ha.

- b. Evaluasi Keberhasilan Penanaman N-5

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan pada 10 Lokasi.

- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun 1 buku.

- d. Pengendalian Pengelolaan DAS

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kinerja pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun 2 DAS.

- e. Pembuatan Bibit Tanaman Hutan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah bibit yang berkualitas 250.000 batang.

- f. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan 7 Sertifikat/2 buku.
- g. Konservasi Sumber Daya Genetik  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Terbangunan / terpeliharanya sumberdaya genetik 2 unit.

## **5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**

Sasaran Strategis program yaitu :

Indikator kinerja utama program adalah :

- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK
- Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)

*Kegiatan-kegiatan :*

- a. Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Termonitornya Produksi Hasil Hutan dan PNBP sektor Kehutanan 10 UPTD/ KPH.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Agam Raya 2 unit
- c. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Pasaman Raya 5 unit.

- d. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
- Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Sijunjung 2 unit.
- e. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
- Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Dharmasraya 2 unit
- f. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
- Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan 3 unit.
- g. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
- Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota 26 unit.
- h. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
- Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPHL Bukit Barisan 4 unit.
- i. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Solok 2 unit.

- j. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Mentawai.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Mentawai 10 unit.

- k. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu yang termonitor diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari 2 unit

- l. Supervisi dan Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan industry kehutanan 20 Kali.

- m. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Agam Raya

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan 2 Petak.

- n. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Pasaman Raya

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan 2 Petak.

- o. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Sijunjung

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan 2 Petak.
- p. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Dharmasraya  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan 2 Petak.
- q. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Limapuluh Kota.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah petak pada wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan 2 Petak.
- r. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Pesisir Selatan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan 2 Petak.
- s. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan 2 Petak.
- t. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Solok  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan 2 Petak.
- u. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah petak pada wilayah kelola KPH terencana dan termanfaatkan 3 Petak.
- v. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Mentawai.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan 2 Petak.

- w. Pengembangan Kemitraan Kehutanan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  
➤ Jumlah Kemitraan yang difasilitasi 4 unit.
- x. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  
➤ Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola 1 Komoditi.
- y. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  
➤ Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola 1 Komoditi.
- z. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  
➤ Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola 1 Komoditi.
- aa. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  
➤ Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola 1 Komoditi.
- bb. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  
➤ Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola 1 Komoditi.
- cc. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Solok.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  
➤ Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Solok yang terkelola 1 Komoditi.
- dd. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :  
➤ Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola 1 Komoditi.
- ee. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola 1 Komoditi.

ff. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola 1 Komoditi.

gg. Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH Mentawai

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola 1 Komoditi.

## **6. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan**

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

*Kegiatan-kegiatan :*

a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah SDM pengelola HN, HKm, HTR, dan Kemitraan Kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas 180 orang.

b. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Agam Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Agam Raya 3 kelompok.

c. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Pasaman Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan

Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya 3 kelompok.

- d. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Sijunjung.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Sijunjung 3 kelompok.

- e. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Dharmasraya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Dharmasraya 2 kelompok.

- f. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Solok.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Solok 2 kelompok.

- g. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Hulu Batang Hari.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari 3 kelompok

- h. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan 2 kelompok
- i. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Bukit Barisan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan 4 kelompok
- j. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Lima Puluh Kota.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan (Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan) pada wilayah kelola KPH Lima Puluh Kota 3 kelompok
- k. Supervisi, Bimtek dan Pembinaan Dalam Rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah supervisi, bimtek dan pembinaan penyiapan pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan 20 kali.
- l. Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah pengelola perhutanan sosial yang mengikuti forum 110 orang.
- m. Pengembangan Hutan Mangrove Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.  
Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :

- Jumlah koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya 1 kali.
- n. Pengembangan Hutan Mangrove Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
- Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :
- Jumlah koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan 1 kali.
- o. Pengembangan Hutan Mangrove Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.
- Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :
- Jumlah koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya 1 kali.
- p. Pengembangan Hutan Mangrove Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan.
- Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :
- Jumlah koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan 1 kali.
- q. Pengembangan Hutan Mangrove Pada Wilayah Kelola KPH Mentawai.
- Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :
- Jumlah koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai 2 kali.
- r. Supervisi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove
- Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
- Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove 5 kali.
- s. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan
- Indikator Kinerja Kegiatan Adalah :
- Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM 75 orang.
- t. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada wilayah kelola KPH Agam Raya 1 Unit.

- u. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya 1 Unit.

- v. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada wilayah kelola KPH Sijunjung 1 Unit.

- w. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada wilayah kelola KPH Solok 1 Unit.

- x. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari 1 Unit.

- y. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada wilayah kelola KPH Dharmasraya 1 Unit.

- z. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan 1 Unit.
- aa. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota 1 Unit.
- bb. Supervisi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan 8 kali.
- cc. Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan.  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya 5 kelompok.

## **7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

*Kegiatan-kegiatan :*

- a. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan 2 laporan.
- b. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2 laporan.
- c. Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun 1 buku

## 8. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Indikator kinerja utama program adalah

- ✓ Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%.

*Kegiatan-kegiatan :*

- a. Penyediaan jasa surat-menyurat

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi selama 12 bulan.

- b. Penyediaan jasa komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan air, listrik, dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi selama 12 bulan.

- c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi selama 12 Bulan (11 unit).

- d. Penyediaan jasa kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Jasa kebersihan, Pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi selama 12 bulan.

- e. Penyediaan alat tulis kantor

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan alat tulis perkantoran yang terpenuhi selama 12 bulan.

- f. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor selama 12 bulan.

- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia 12 bulan.

- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 12 bulan.

i. Penyediaan makanan dan minuman

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Pertemuan / rapat yang diselenggara 12 bulan.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti 12 bulan.

k. Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Publikasi kegiatan OPD yang tersedia 12 bulan.

l. Penyediaan jasa pembinaan fisik & mental aparatur

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Wirid kantor dan kegiatan senam kantor 12 bulan.

## **9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%

*Kegiatan-kegiatan :*

a. Pengadaan Mebeleur

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi sebanyak 14 unit

b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi sebanyak 47 unit.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

➤ Rumah dinas/ mess yang terpelihara sebanyak 2 unit.

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Gedung kantor Dinas yang terpelihara sebanyak 3 unit.
- e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Kendaraan dinas operasional yang terpelihara 42 unit.
- f. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara sebanyak 203 unit.
- g. Pemeliharaan Rutin /Berkala Instalasi dan Jaringan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara 12 bulan.
- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Rumah jabatan yang terehabilitasi 1 unit.

#### **10. Program Peningkatan Disiplin**

Indikator kinerja utama program adalah

Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

*Kegiatan-kegiatan :*

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi sebanyak 458 orang.

#### **11. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Indikator kinerja utama program adalah

Rata-rata lama PNS mengikuti diklat

*Kegiatan-kegiatan :*

- a. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan  
Indikator Kinerja Kegiatan adalah :
  - Aparatur Sipil Negara yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 63 kali.

## **12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**

### **Kinerja dan Keuangan**

Indikator kinerja utama program adalah

Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD.

*Kegiatan-kegiatan :*

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Tahunan yang tersusun sebanyak 5 dokumen

- b. Penatausahaan keuangan SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana 12 bulan.

- c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra Yang Tersusun sebanyak 5 dokumen.

- d. Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Honorarium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset 12 bulan.

- e. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan yang terlaksana 10 UPTD/ KPH.

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta bagian dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan kehutanan Tahun 2020 oleh Dinas Kehutanan bertujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Dalam Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan dimaksud maka ditetapkanlah sasaran pembangunan kehutanan yang akan dicapai pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kawasan hutan dan potensi yang ada di dalamnya diakui secara legal dan aktual.
2. Berkurangnya Kerusakan Hutan Melalui Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan serta adaptasi perubahan iklim.
3. Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis.
4. Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
5. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm.
6. Tersedianya data dan informasi untuk pembangunan kehutanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Konflik tenurial.
2. Penduduk miskin di dalam dan sekitar hutan.
3. Tingginya kebutuhan lahan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan.
5. Tingginya degradasi dan deforestasi.
6. Belum mantapnya kawasan hutan.
7. Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan pengelolaan hutan.
2. Tersedianya anggaran pembangunan.
3. Kawasan hutan yang luas.
4. Peraturan perundangan bidang kehutanan.
5. Tingginya permintaan hasil hutan.
6. Minat investasi di bidang kehutanan.
7. Perhatian dunia internasional.
8. Potensi Sumber Daya Hutan cukup besar.

Padang, Juli 2019

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Barat



YOZARWARDI, S.Hut, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Tabel T-C 29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.00.04.2.00.04.01.001</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.001.0001	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0006	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan yang terpenuhi	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0003	- Penyediaan Jasa Kebersihan, pengamanan dan sopir Kantor	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0008	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat-alat tulis kantor yang terpenuhi	72 Bulan	24 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0009	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	72 bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0010	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0013	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0024	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan/ rapat yang diselenggarakan	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0015	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0017	- Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi dan Publikasi	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.001.0018	- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid kantor dan kegiatan senam dikantor	72 bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
<b>2.00.04.2.00.04.01.002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.002.0011	- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	72 Bulan	24 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	36 Bulan	50
2.00.04.2.00.04.01.002.0006	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	42 Bulan	78 Bulan	108

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.00.04.2.00.04.01.002.0007	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	1,254 unit	340 Unit	312 Unit	312 Unit	100%	287 Unit	939 Unit	75
2.00.04.2.00.04.01.002.0005	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	35 unit	8 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	8 Unit	20 Unit	57
2.00.04.2.00.04.01.002.0023	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	66 Bulan	24 bulan	6 Bulan	6 Bulan	100%	12 bulan	42 bulan	64
2.00.04.2.00.04.01.002.0371	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	130 unit	36 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	30 Unit	92 Unit	71
2.00.04.2.00.04.01.002.0362	- Pembangunan Gedung kantor	Gedung kantor yang terbangun	7 unit	7 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	8 Unit	114
2.00.04.2.00.04.01.002.0001	- Pengadaan Meubelair	Kebutuhan Meubelair yang terpenuhi	137 unit	87 unit	15 Unit	15 Unit	100%	5 unit	107 unit	78
2.00.04.2.00.04.01.002.0055	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Rumah Jabatan/ Rumah Dinas / Mess yang terpelihara	25 unit	17 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	21 Unit	84
2.00.04.2.00.04.01.002.0037	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kebutuhan kendaraan operasional yang terpenuhi	7 unit	10 unit	1 unit	1 Unit	100%	-	11 unit	157
<b>2.00.04.2.00.04.01.003</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.003.0001	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	3,019 orang	727 orang	573 Org	573 Org	100%	573 orang	1,873 orang	62
<b>2.00.04.2.00.04.01.004</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rata-rata lama PNS mengikuti Diklat</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	
2.00.04.2.00.04.01.004.0001	- Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN yang mengikuti BIMTEK	96 orang	21 orang	47 Org	47 Org	100%	16 orang	84 orang	88
<b>2.00.04.2.00.04.01.005</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.005.0002	- Penatausahaan Keuangan SKPD	Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola Keuangan OPD lainnya yang terbayarkan	72 bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	67
2.00.04.2.00.04.01.005.0003	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	30 Dok	10 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	20 Dok	67
2.00.04.2.00.04.01.005.0001	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	33 Dok	12 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	5 Dok	23 Dok	70
2.00.04.2.00.04.01.002.0011	- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD (Pindah Program)	Honorium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Monitoring dan evaluasi dan kegiatan OPD	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan yang terlaksana	40 UPTD/ KPH	10 UPTD KPH	-	-	-	10 UPTD/ KPH	20 UPTD/ KPH	50
<b>2.00.04.2.00.04.01.130.</b>	<b>Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>	<b>Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>195.53%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.130.0003	- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	420 km	70 km	70 Km	70 Km	100%	70 km	210 km	50
2.00.04.2.00.04.01.130.0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali	69 Unit	46 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	-	69 Unit	100
2.00.04.2.00.04.01.130.0004	- Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	Tersusunnya buku pengendalian dan perencanaan dan tata hutan	4 Buku	-	1 Buku	1 Buku	100%	1 buku	2 Buku	50
2.00.04.2.00.04.01.130.0002	- Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Terlaksananya sosialisasi identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	80 Kali	-	20 Kali	20 Kali	100%	20 kali	40 Kali	50
<b>2.00.04.2.00.04.01.129.</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan</b>	<b>Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat</b>	<b>21.21 Ha</b>	<b>8.50 %</b>	<b>11,68 %</b>	<b>16,62 %</b>	<b>195.53%</b>	<b>14.86% %</b>	<b>14.86% %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.129.0001	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	Terlaksananya Musrenbanghutta, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	30 UPTD KPH	20 UPTD KPH	10 UPTD KPH	10 UPTD KPH	100%	-	30 UPTD KPH	100
2.00.04.2.00.04.01.129.0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan	Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	62 Kelp	37 Kelp	25 Kelp	25 Kelp	100%	-	62 Kelp	100
2.00.04.2.00.04.01.129.0002	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	900 org	180 org	180 org	180 org	100%	180 org	540 org	60
2.00.04.2.00.04.01.129.0005	- Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	600 Org	160 org	110 org	110 org	100%	110 org	380 org	63
2.00.04.2.00.04.01.129.0004	- Pengembangan Hutan Mangrove	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove	18 Kali	12 Kali	6 kali	6 kali	100%	-	18 kali	100
2.00.04.2.00.04.01.129.0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	5 Unit	-	5 unit	5 unit	100%	-	5 unit	100
2.00.04.2.00.04.01.129.0006	- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	394 orang	94 orang	75 orang	75 orang	100%	75 orang	244 orang	62
<b>2.00.04.2.00.04.01.127.</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK</b>	<b>85 %</b>	<b>81 %</b>	<b>82 %</b>	<b>76,26 %</b>	<b>93%</b>	<b>83% %</b>	<b>83 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.127.0001	- Pembinaan PNPB	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNPB sektor kehutanan	60 Kab/ Kota	20 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	100%	10 Kab/ Kota	40 Kab/ Kota	67

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.00.04.2.00.04.01.127.</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)</b>	<b>85 %</b>	<b>81 %</b>	<b>82 %</b>	<b>92,93 %</b>	<b>113.33%</b>	<b>83% %</b>	<b>83 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.127.0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	Termonitornya izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu	39 Kab/Kota	26 Kab/Kota	13 Kab/ Kota	13 Kab/ Kota	100%	-	39 Kab/ Kota	100
2.00.04.2.00.04.01.127.0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH	Hutan pada wilayah kelola KPH terencana dan dimanfaatkan	15 Petak	10 Petak	5 Petak	5 Petak	100%	-	15 Petak	100
2.00.04.2.00.04.01.127.0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH	Potensi hasil hutan di wilayah KPH yang terkelola	8 Komoditi	6 Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	100%	-	8 Komoditi	100
2.00.04.2.00.04.01.127.0005	- Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah unit kemitraan	16 unit	-	4 unit	4 unit	100%	4 unit	8 unit	50
<b>2.00.04.2.00.04.01.128.</b>	<b>Rehabilitasi Hutan dan lahan</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit yang berkualitas</b>	<b>700.000 Ha</b>	<b>450.000 btg</b>	<b>250.000 btg</b>	<b>250.000 btg</b>	<b>100%</b>	<b>250.000 Btg</b>	<b>950.000 Btg</b>	
2.00.04.2.00.04.01.128.0001	- Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih	1,450.000 Btg	450.000 Btg	250.000 Btg	250.000 Btg	100%	250.000 Btg	950.000 Btg	66
2.00.04.2.00.04.01.128.0002	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	42 Unit	14 Unit	7 unit	7 unit	100%	7 Unit	28 unit	67
2.00.04.2.00.04.01.128.0003	- Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangunnya dan terpeliharanya sumber daya genetik	18 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	16 unit	89
<b>2.00.04.2.00.04.01.077.</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase penurunan laju kerusakan hutan</b>	<b>8.15 %</b>	<b>4.15 %</b>	<b>10 %</b>	<b>19 %</b>	<b>100%</b>	<b>12 %</b>	<b>12 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.077.0007	- Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	5 Kasus (100%)	100 %	100
2.00.04.2.00.04.01.077.0001	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	2,725 orang	530 org	450 org	450 org	100%	450 org	1,430 org	52
2.00.04.2.00.04.01.077.0008	- Pengukuran simpanan karbon	Tersedianya data simpanan karbon	123 petak	43 Petak	20 petak	20 Petak	100%	20 Petak	83 Petak	67
2.00.04.2.00.04.01.077.0009	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	Wilayah kelola KPH yang di Konservasi	3 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	4 Lokasi	133
2.00.04.2.00.04.01.077.0011	- Penyusunan peta rawan bencana kawasan hutan	Peta rawan bencana kawasan hutan	36 Peta	12 Peta	6 Peta	6 Peta	100%	6 Peta	24 Peta	67
2.00.04.2.00.04.01.077.0006	- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	4 unit	-	1 unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	50
2.00.04.2.00.04.01.077.0005	- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan	6 Lap	2 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	4 Lap	67
2.00.04.2.00.04.01.077.0010	- Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	6 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	4 Lokasi	67

Kode	Urusan/Bid. Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.00.04.2.00.04.01.078.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.078.0010	- Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan	60 UPTD KPH	20 UPTD KPH	10 UPTD KPH	10 UPTD KPH	100%	0 UPTD KPH	30 UPTD KPH	50
2.00.04.2.00.04.01.078.0006	- Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	Terlaksananya implementasi ISO 9000:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	15 Lap	5 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	9 Lap	60
2.00.04.2.00.04.01.078.0007	- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	12 Lap	4 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	8 Lap	67
2.00.04.2.00.04.01.078.0008	- Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Tersedianya data neraca sumberdaya hutan	4 Buku	-	1 Buku	1 Buku	100%	1	2 Buku	50
2.00.04.2.00.04.01.078.0009	- Peningkatan Kapasitas SDM	Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM yang terpenuhi	24 kali	-	- kali	- kali	100%	-	- kali	-
<b>2.00.04.2.00.04.01.080.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase penurunan Luas Lahan Kritis</b>	<b>2.26 %</b>	<b>0.43 %</b>	<b>1.09 %</b>	<b>1,10 %</b>	<b>100.92%</b>	<b>2.00 %</b>	<b>2,26 %</b>	
2.00.04.2.00.04.01.080.0001	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	Terehabilitasinya lahan kritis di luar kawasan hutan	785 ha	65 Ha	180 Ha	180 Ha	100%	180 Ha	425 Ha	54
2.00.04.2.00.04.01.080.0002	- Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi	60 Lokasi	20 lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	100%	10 lokasi	40 Lokasi	67
2.00.04.2.00.04.01.080.0003	- Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Daerah Aliran Sungai yang terkendali	12 DAS	2 DAS	2 Dok	2 Dok	100%	2 DAS	6 Dok	50
<b>2.00.04.2.00.04.01.133.</b>	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>	<b>Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)</b>	<b>30 %</b>	<b>88.21 %</b>	<b>5 %</b>	<b>86,32 %</b>	<b>191.82%</b>	<b>5 %</b>	<b>50 %</b>	<b>86,32</b>
2.00.04.2.00.04.01.133.0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan	30 %	88.21 %	5 %	86.32 %	191.82%	5 %	180 %	598

Padang, Juli 2019

KEPALA DINAS,



**YOZARWARDI U.P., S.Hut., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

**TABEL T-C.30.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>Semula :</b> Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan <b>Menjadi :</b> Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,180 %	100 %	100 %	
1 -	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km	70 km	70 km	70 km	70 km	70 km	70 km	70 km	70 km	70 km	
2 -	Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu	2 lok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 -	<b>Semula :</b> Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	<b>Semula :</b> Terpantau dan termonitornya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya	13 kab/kota	13 Kab/Kota	-	-	-	-	13 Kab/Kota	-	-	-	
4 -	<b>Menjadi (1) :</b> Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	<b>Menjadi (1) :</b> Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan	-	-	23 Unit	-	-	-	-	23 Unit	-	-	
5 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Agam Raya	-	-	-	3 unit	3 unit	3 unit	-	-	3 unit	3 unit	
6 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	-	-	4 unit	4 unit	
7 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Sijunjung	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	
8 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	
9 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	
10 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	
11 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	
12 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Solok	-	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	-	-	4 unit	4 unit	
13 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	8 unit	8 unit	8 unit	-	-	8 unit	8 unit	
14 -	<b>Menjadi (2) :</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah Kelola KPH Mentawai	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	
15 -	<b>Menjadi (3) :</b> Supervisi dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Supervisi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
16 -	<b>Semula :</b> Pembuatan Petak Ukur Permanen <b>Menjadi :</b> Pengukuran simpanan karbon (Program Perlindungan dan KSDA)	<b>Semula :</b> Tersedianya data potensi HHK dan HHBK sebagai data perhitungan karbon <b>Menjadi :</b> Terbangunnya petak ukur permanen	-	43 Petak	-	-	-	-	43 Petak	-	-	-	
17 -	Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Teridentifikasi usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat	-	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	<b>Semula :</b> Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan.	-	-	10 buku	-	-	-	-	10 buku	-	-	
19	Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	<b>Menjadi :</b> Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	-	-	-	1 buku	1 buku	1 buku	-	-	1 buku	1 buku	
20	<b>Semula :</b> Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat <b>Menjadi (1) :</b> Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	<b>Semula :</b> Terlaksananya sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial.	-	-	20 kali	-	-	-	-	20 kali	-	-	
21	<b>Menjadi (2) :</b> Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	<b>Menjadi :</b> Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	-	-	-	20 kali	20 kali	20 kali	-	-	20 kali	20 kali	
22	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (DBH-DR)	Jumlah Konflik dan Hutan Adat yang teridentifikasi dan terfasilitasi	-	-	15 buah	-	-	-	-	15 buah	-	-	
<b>II Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>			<b>80 %</b>	<b>81 %</b>	<b>82 %</b>	<b>83 %</b>	<b>84 %</b>	<b>85 %</b>	<b>81 %</b>	<b>82 %</b>	<b>83 %</b>	<b>84 %</b>	
1	<b>Semula :</b> Optimalisasi PNPB	<b>Semula :</b> Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, luran kehutanan dan penggunaan peralatan (IUPHHK hutan alam	3 Lap	3 Lap	-	-	-	-	3 Lap	-	-	-	
2	<b>Menjadi :</b> Pembinaan PNPB Sektor Kehutanan	<b>Menjadi :</b> Termonitornya produksi hasil hutan dan PNPB sektor Kehutanan	-	-	10 Kab/ Kota (UPTD KPH)	10 UPTD/ KPH	10 UPTD/ KPH	10 UPTD/ KPH	-	10 Kab/ Kota (UPTD KPH)	10 UPTD/ KPH	10 UPTD/ KPH	
<b>III Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>			<b>80 %</b>	<b>81 %</b>	<b>82 %</b>	<b>83 %</b>	<b>84 %</b>	<b>85 %</b>	<b>81 %</b>	<b>82 %</b>	<b>83 %</b>	<b>84 %</b>	
1	<b>Semula :</b> Pembinaan dan pengembangan HHHBK. <b>Menjadi (1) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	<b>Semula :</b> Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan produksi HHHBK <b>Menjadi (1) :</b> Termonitornya Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	1 Lap	1 Lap	13 Kab/ Kota	-	-	-	1 Lap	13 Kab/ Kota	-	-	
2	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Agam Raya	-	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-	2 unit	
3	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	5 unit	5 unit	5 unit	-	-	5 unit	5 unit	
4	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Sijunjung	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	
5	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-	2 unit	
6	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	3 unit	3 unit	3 unit	-	-	3 unit	3 unit	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	-	-	-	26 unit	26 unit	26 unit	-	-	26 unit	26 unit	
8	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	-	-	4 unit	4 unit	
9	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Solok	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	
10	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Mentawai	-	-	-	10 unit	10 unit	10 unit	-	-	10 unit	10 unit	
11	<b>Menjadi (2) :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-	2 unit	
12	<b>Menjadi (3) :</b> Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
13	<b>Semula :</b> Pengembangan Industri Hutan Alam dan Hutan Tanaman.	<b>Semula :</b> Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan, penatausahaan produksi hasil hutan olahan, realisasi pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman	3 Lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	<b>Menjadi :</b> Pengembangan industri hutan primer hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman	<b>Menjadi :</b> Termonitornya pencapaian target produksi HHK dan HHBK	-	3 Lap	-	-	-	-	3 Lap	-	-	-	
15	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan	1 Lap	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	
16	Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan	10 Kelp	10 Kelp	-	-	-	-	10 Kelp	-	-	-	
17	<b>Semula :</b> Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu pada wilayah KPHL	<b>Semula :</b> Termanfaatkannya dan berkembangnya HHK, HHBK dan Jasling di wilayah KPH	2 lok	10 lok	-	-	-	-	10 lok	-	-	-	
18	<b>Menjadi (1) :</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH	<b>Menjadi (1) :</b> Hutan pada Wilayah KPH terencana dan termanfaatkan	-	-	5 petak	-	-	-	-	5 petak	-	-	
19	<b>Menjadi (2) :</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	
20	<b>Menjadi (2) :</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	
21	<b>Menjadi (2) :</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	
22	<b>Menjadi (2) :</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	
23	<b>Menjadi (2) :</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	<b>Menjadi (2):</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan dimanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	
25	<b>Menjadi (2):</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah petak pada wilayah KPH KPH Limapuluh Kota terencana dan dimanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	
26	<b>Menjadi (2):</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan dimanfaatkan	-	-	-	3 petak	3 petak	3 petak	-	-	3 petak	3 petak	
27	<b>Menjadi (2):</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan dimanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	
28	<b>Menjadi (2):</b> Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan dimanfaatkan	-	-	-	2 petak	2 petak	2 petak	-	-	2 petak	2 petak	
29	<b>Semula:</b> Pengelolaan potensi hutan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan	<b>Semula:</b> Tersedianya data jasa lingkungan wisata alam di wilayah KPH	3 lok	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	
30	<b>Menjadi (1):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH	<b>Menjadi (1):</b> Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH yang terkelola	-	-	2 komoditi	-	-	-	-	2 komoditi	-	-	
31	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agama Raya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Agama Raya yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
32	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
33	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Siulung	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Siulung yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
34	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
35	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
36	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
37	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
38	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
39	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
40	<b>Menjadi (2):</b> Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola	-	-	-	1 komoditi	1 komoditi	1 komoditi	-	-	1 komoditi	1 komoditi	
41	<b>Semula:</b> Pembangunan Kemitraan Kehutanan	<b>Semula:</b> Jumlah unit kemitraan	-	-	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	-	-	
42	<b>Menjadi:</b> Pembangunan Kemitraan Kehutanan	<b>Menjadi:</b> Jumlah kemitraan yang difasilitasi	-	-	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	4 Unit	4 Unit	
43	Pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH, Tahura dan Hutan Kota - Resort (DAK)	Operasionalisasi KPH dan Tahura untuk peningkatan PAD melalui wisata	-	-	10 unit	-	-	-	-	10 unit	-	-	
44	Pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH, Tahura dan Hutan Kota - Wisata (DAK)	Operasionalisasi KPH dan Tahura untuk peningkatan PAD melalui wisata	-	-	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-	
45	Pembangunan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan - alat ekonomi produktif (DAK)	Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks gini	-	-	6 unit	-	-	-	-	6 unit	-	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV	<b>Semula :</b> Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	<b>Semula :</b> Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Menjadi :</b> Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam	<b>Menjadi :</b> Persentase penurunan laju kerusakan hutan	-	4,15 %	-	-	-	-	9,92 %	-	-	-	-
	<b>Menjadi :</b> Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam	<b>Menjadi :</b> Persentase penurunan laju kerusakan hutan	-	-	10 %	12 %	14 %	15 %	-	19,22 %	14 %	15 %	-
1	<b>Semula :</b> Pengamanan dan Perlindungan Hutan	<b>Semula :</b> Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, money kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi	6 Lap	14 Lap	-	-	-	-	14 Lap	-	-	-	-
2	<b>Menjadi (1) :</b> Pengamanan dan Perlindungan Hutan	<b>Menjadi (1) :</b> Kasus tindak pidana hutan yang ditindaklanjuti	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-
3	<b>Menjadi (2) :</b> Pengamanan dan Perlindungan Hutan	<b>Menjadi (2) :</b> kasus tindak pidana hutan yang ditindaklanjuti	-	-	-	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	-	-	5 Kasus	5 Kasus	-
4	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Agam Raya	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	-	-	-	25 kali	25 kali	25 kali	-	-	25 kali	25 kali	-
5	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	25 kali	25 kali	25 kali	-	-	25 kali	25 kali	-
6	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Sijunjung	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	-	-	-	15 kali	15 kali	15 kali	-	-	15 kali	15 kali	-
7	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	15 kali	15 kali	15 kali	-	-	15 kali	15 kali	-
8	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	15 kali	15 kali	15 kali	-	-	15 kali	15 kali	-
9	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota	-	-	-	15 kali	15 kali	15 kali	-	-	15 kali	15 kali	-
10	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	20 kali	20 kali	20 kali	-	-	20 kali	20 kali	-
11	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Solok	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Solok	-	-	-	15 kali	15 kali	15 kali	-	-	15 kali	15 kali	-
12	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	20 kali	20 kali	20 kali	-	-	20 kali	20 kali	-
13	<b>Menjadi (3) :</b> Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Mentawai	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	-	-	-	20 kali	20 kali	20 kali	-	-	20 kali	20 kali	-

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	<b>Semula :</b> Perlindungan dan konservasi alam di wilayah KPH	<b>Semula :</b> Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data jenis satwa dan tumbuhan liar dikawasan hutan wilayah kelola KPH	5 Lap	10 Dok	-	-	-	-	10 Dok	-	-	-	-
15	<b>Meniadi (1) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	<b>Meniadi (1) :</b> Wilayah kelola KPH yang dikonservasi	-	-	1 Lok	-	-	-	-	1 Lok	-	-	-
16	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
17	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
18	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
19	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
20	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
21	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
22	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Solok yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
23	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
24	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang dikonservasi	-	-	-	3 Lok	3 Lok	3 Lok	-	-	3 Lok	3 Lok	-
25	<b>Meniadi (2) :</b> Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	<b>Meniadi (2) :</b> Wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonservasi	-	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	-	1 Lok	1 Lok	-
26	<b>Semula :</b> Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	<b>Semula :</b> Terlaksananya Penguatan Lembaga PPHBN melalui Pembinaan intensif serta Sosialisasi Perda peran Serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan	2 Lap, 80 org/ 475 PHBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	<b>Meniadi :</b> Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	<b>Meniadi :</b> Terlaksananya pelatihan dan penguatan kelembagaan PPHBN	-	2 Lap	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	-
28	<b>Meniadi :</b> Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	<b>Meniadi :</b> Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	-	-	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	-	450 orang	450 orang	450 orang	-
29	<b>Semula :</b> Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	<b>Meniadi :</b> Terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	1 kab/ kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	<b>Meniadi (1) :</b> Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan	<b>Meniadi (1) :</b> Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	-	1 Lokasi	-	-	-	-	1 Lokasi	-	-	-	-
31	<b>Meniadi (2) :</b> Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	<b>Meniadi (2) :</b> Pengembangan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi	-	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-	1 Lok	1 Lok	1 Lok	-
32	<b>Semula :</b> Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	<b>Semula :</b> Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan	4 Lok (4 Lap)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	<b>Meniadi :</b> Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	<b>Meniadi :</b> Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan	-	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-
34	<b>Meniadi (1) :</b> Penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan	<b>Meniadi (1) :</b> Peta rawan bencana kawasan hutan	-	-	6 Peta	-	-	-	-	6 Peta	-	-	-
35	<b>Meniadi (2) :</b> Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan	<b>Meniadi (2) :</b> Peta laju kerusakan hutan yang tersusun	-	-	-	6 Peta	6 Peta	6 Peta	-	-	6 Peta	6 Peta	-

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan yang terlaksana	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
37	Pengukuran Simpanan Karbon	Tersedianya data simpanan karbon	-	-	20 Petak	20 Petak	20 Petak	20 Petak	-	20 Petak	20 Petak	20 Petak	
38	Identifikasi dan Inventarisasi serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial dan daerah penyangga	Terbentuk dan teridentifikasinya kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat	-	5 lokasi	-	-	-	-	5 lokasi	-	-	-	
39	Identifikasi dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar	Teridentifikasi dan termonitornya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Identifikasi dan Inventarisasi Daerah penyangga	Teridentifikasinya potensi pemanfaatan daerah penyangga di Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial dan daerah penyangga	Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Prov. Sumatera Barat	-	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	
42	Pengembangan dan Pembentukan Ekosistem Esensial	Terfasilitasinya Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	<b>Semula:</b> Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem	<b>Semula:</b> Terbentuknya kawasan ekosistem esensial dan tersedianya data pengelolaan satwa dan tumbuhan liar yang tidak dilindungi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	<b>Menjadi:</b> Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem	<b>Menjadi:</b> Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
V	<b>Semula:</b> Program Pengendalian Kebakaran Hutan	<b>Semula:</b> Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	5 %	10 %	-	-	-	-	88,21 %	-	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Program Pengendalian Kebakaran Hutan	<b>Menjadi:</b> Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	-	-	45 %	50 %	55 %	60 %	-	86,32 %	55 %	60 %	
1	<b>Semula:</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<b>Semula:</b> Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	33 Kali	8 Lap	-	-	-	-	8 Lap	-	-	-	
2	<b>Menjadi (1):</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<b>Menjadi (1):</b> Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan	-	-	5 %	-	-	-	-	5 %	-	-	
3	<b>Menjadi (2):</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Agam Raya	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
4	<b>Menjadi (2):</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
5	<b>Menjadi (2):</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Siuniung	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Siuniung	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
6	<b>Menjadi (2):</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
7	<b>Menjadi (2):</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
8	<b>Menjadi (2):</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
9	<b>Menjadi (2):</b> Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	<b>Menjadi (2)</b> : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok.	<b>Menjadi (2)</b> : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Solok.	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
11	<b>Menjadi (2)</b> : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2)</b> : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	25 Kali	25 Kali	25 Kali	-	-	25 Kali	25 Kali	
12	<b>Menjadi (2)</b> : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai	<b>Menjadi (2)</b> : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Mentawai	-	-	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20 Kali	
13	<b>Menjadi (3)</b> : Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	<b>Menjadi (3)</b> : Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	23 Kali	30 Kali	30 Kali	-	-	23 Kali	30 Kali	
14	Pengembangan sarana prasarana dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	-	-	406 unit	267 Unit	-	-	-	406 unit	267 Unit	-	
15	Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode (DBH-DR)	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	-	450 orang	450 orang	-	-	-	450 orang	450 orang	-	
16	Pelatihan/pembekalan/inhoustraining/p enyegaran/bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah peserta bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	-	375 orang	510 orang	-	-	-	375 orang	510 orang	-	
17	Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	-	-	40 Kali	18 Kali	-	-	-	40 Kali	18 Kali	-	
18	Groundcheck Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran (DBH-DR)	Jumlah Groundcheck hotspot	-	-	10 Kali	-	-	-	-	10 Kali	-	-	
19	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	-	-	15 Kali	18 Kali	-	-	-	15 Kali	18 Kali	-	
20	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	-	-	10 Kali	55 Kali	-	-	-	10 Kali	55 Kali	-	
21	Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/instansi terkait lainnya (DBH-DR)	Jumlah patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan	-	-	25 Kali	-	-	-	-	25 Kali	-	-	
22	Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain (DBH-DR)	Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan	-	-	30 Kali	46 Kali	-	-	-	30 Kali	46 Kali	-	
VI	<b>Semula</b> : Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<b>Semula</b> : Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit yang berkualitas	200,000 btg	250,000 btg	250,000 btg				250,000 btg	250,000 btg			
	<b>Menjadi</b> : Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	<b>Menjadi</b> : 1. Persentase penurunan luas lahan kritis 2. Indeks Tutupan Hutan				1. 2.00 % 2. 62.27 %	1. 2.21 % 2. 61.84 %	1. 2.26 % 2. 61.41 %			1. 2.00 % 2. 62.27 %	1. 2.21 % 2. 61.84 %	
1	<b>Semula</b> : Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih	200,000 Btg	250,000 Btg/ 10 unit/ 3 sertifikat/ 15 kab/ kota	250,000 Btg	-	-	-	250,000 Btg/ 10 unit/ 3 sertifikat/ 15 kab/ kota	250,000 Btg	-	-	
2	<b>Menjadi</b> : Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas	-	-	-	250,000 btg	250,000 btg	250,000 btg	-	-	250,000 btg	250,000 btg	
3	Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan (DBH-DR)	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih	-	-	400,000 btg/ 5 sumber benih tanaman hutan	5,000 btg	-	-	-	400,000 btg/ 5 sumber benih tanaman hutan	5,000 btg	-	
4	Kegiatan Pembuatan Bibit Tanaman Hutan/ Gaharu (POKIR)	Tersedianya jumlah bibit tanaman hutan yang berkualitas	-	-	80,000 btg	-	-	-	-	80,000 btg	-	-	
5	<b>Semula</b> : Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman, terbentuknya pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, tersedianya bibit tanaman hutan yang bermutu baik, tersedianya informasi perbenihan tanaman hutan	13 Kab/ kota	13 kab/ kota	-	-	-	-	13 kab/ kota	-	-	-	
6	<b>Menjadi</b> : Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	-	-	7 unit	6 Sertifikat / 2 buku	7 Sertifikat / 2 buku	8 Sertifikat / 2 buku	-	7 unit	6 Sertifikat / 2 buku	7 Sertifikat / 2 buku	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	<b>Semula :</b> Konservasi Sumber Daya Genetik	<b>Semula :</b> Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan	4 lok	4 Lok	-	-	-	-	4 Lok	-	-	-	
8	<b>Menjadi :</b> Konservasi Sumber Daya Genetik	<b>Menjadi (1) :</b> Terbangun dan terpeliharanya sumber daya genetik	-	-	4 unit	-	-	-	-	4 unit	-	-	
9	<b>Menjadi :</b> Konservasi Sumber Daya Genetik	<b>Menjadi (2) :</b> Terbangun/ terpeliharanya sumberdaya genetik	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1. Persentase penurunan Luas Lahan Kritis 2. Indeks Tutupan Hutan	1) 0,18 % 2) 63.65 %	1) 0,43 % 2) 63.11 %	1) 1,09 % 2) 62.69 %	1) 2,00 % 2) 62.27 %	1) 2,21 % 2) 61.84 %	1) 2,26 % 2) 61.41 %	1) 0,43 % 2) 63.11 %	1) 1,09 % 2) 62.69 %	1) 2,00 % 2) 62.27 %	1) 2,21 % 2) 61.84 %	
10	<b>Semula :</b> Rehabilitasi Hutan dan Lahan <b>Menjadi :</b> Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi	65 Ha	-	180 Ha	180 Ha	180 Ha	180 Ha	-	180 Ha	180 Ha	180 Ha	
11	Pengembangan Sarana Konservasi tanah	Terbangunnya bangunan konservasi tanah	2 Unit	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	-	-	-	
12	<b>Semula :</b> Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL	<b>Semula :</b> Terlaksananya monitoring/ evaluasi dan pembinaan RHL/Reklamasi/ DAK oleh Kabupaten/ Kota	18 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	-	-	-	-	10 Kab/ Kota	-	-	-	
13	<b>Menjadi (1) :</b> Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL	<b>Menjadi (1) :</b> Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi	-	-	10 Lokasi	-	-	-	-	10 Lokasi	-	-	
14	<b>Menjadi (2) :</b> Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	<b>Menjadi (2) :</b> Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan	-	-	-	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	-	-	10 Lokasi	10 Lokasi	
15	<b>Semula :</b> Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	<b>Semula :</b> Tersusunnya rencana pengelolaan DAS	7 Pergub	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	
16	<b>Menjadi :</b> Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	<b>Menjadi :</b> Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun	-	-	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	-	2 DAS	2 DAS	2 DAS	
17	<b>Semula :</b> Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL- bukit barisan	<b>Semula :</b> Tersedianya dokumen rancangan Kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh pemegang Izin.	2 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	<b>Menjadi :</b> Inventarisasi dan identifikasi lahan kritis diwilayah kelola KPH	<b>Menjadi :</b> Tersedianya data lahan kritis diwilayah KPH	-	1 Judul	-	-	-	-	1 Judul	-	-	-	
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL	Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun	-	-	-	2 Buku	1 Buku	1 Buku	-	-	2 Buku	1 Buku	
20	Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL- BB (DAK)	Terlaksananya penanaman Rotan dan Pembangunan Bank Buah	55 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK dan Pendukung)	Terlaksananya pembangunan hutan tanaman Jabon dan Pemeliharaan I Tanaman Jabon pada Blok Pemanfaatan KPH	95 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPH (DAK + Pendukung)	Terlaksananya pengayaan hutan lindung dan reboisasi pengayaan lanjutan pada wilayah kelola KPH	160 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPH ( DAK )	Tersedianya sarana prasarana KPH	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Pembuatan Tanaman (DAK)	Terehabilitasinya lahan kritis dalam rangka penurunan lahan kritis, banjir dan longsor	-	-	1,335 Ha	410 Ha	-	-	-	1,335 Ha	410 Ha	-	
25	Pembangunan DAM Penahan (DAK)	Terbangunnya DAM penahan dalam rangka penurunan lahan kritis, banjir dan longsor	-	-	12 Unit	15 Unit	-	-	-	12 Unit	15 Unit	-	
26	Pembuatan Sumur Resapan (DAK)	Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	
27	Pembuatan Gully Plug (DAK)	Gully Plug yang terbangun	-	-	-	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	-	
28	Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 (DAK)	Terpeliharanya tanaman tahun pertama	-	-	-	956 Ha	-	-	-	-	956 Ha	-	
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL (DBH-DR)	Tersusunnya dokumen perencanaan RPRL dan RTnRL	-	-	-	2 Buku	-	-	-	-	2 Buku	-	
30	Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan (DBH-DR)	Terlaksananya penanaman pada lahan kritis	-	-	10 UPTD KPH	10 UPTD KPH	-	-	-	10 UPTD KPH	10 UPTD KPH	-	
VII	<b>Semula :</b> Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. <b>Menjadi :</b> Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	5.32 %	8.50 %	11.68 %	14.86 %	18.03 %	21.21 %	15.39 %	16.62 %	14.86 %	18.03 %	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	<b>Semula :</b> Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	<b>Semula :</b> Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	60 org	120 orang	-	-	-	-	120 orang	-	-	-	-
2	<b>Menjadi :</b> Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	<b>Menjadi :</b> Jumlah SDM pengelola HN, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	-	180 Org	180 Org	180 Org	180 Org	-	180 Org	180 Org	180 Org	-
3	<b>Semula :</b> Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan	<b>Semula :</b> Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (Hkm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	17 Kelp	20 Kelp	-	-	-	-	20 Kelp	-	-	-	-
4	<b>Menjadi (1) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	<b>Menjadi (1) :</b> Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (Hkm, HN dan HTR )	-	-	25 Kelp	-	-	-	-	25 Kelp	-	-	-
5	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Agam Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Agam Raya	-	-	-	3 Kelp	3 Kelp	3 Kelp	-	-	3 Kelp	3 Kelp	-
6	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	3 Kelp	3 Kelp	3 Kelp	-	-	3 Kelp	3 Kelp	-
7	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Sijunjung	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Sijunjung	-	-	-	3 Kelp	3 Kelp	3 Kelp	-	-	3 Kelp	3 Kelp	-
8	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	2 Kelp	2 Kelp	2 Kelp	-	-	2 Kelp	2 Kelp	-
9	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	2 Kelp	2 Kelp	2 Kelp	-	-	2 Kelp	2 Kelp	-
10	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	3 Kelp	3 Kelp	3 Kelp	-	-	3 Kelp	3 Kelp	-
11	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	-	-	-	3 Kelp	3 Kelp	3 Kelp	-	-	3 Kelp	3 Kelp	-
12	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	4 Kelp	4 Kelp	4 Kelp	-	-	4 Kelp	4 Kelp	-
13	<b>Menjadi (2) :</b> Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Solok	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Solok	-	-	-	2 Kelp	2 Kelp	2 Kelp	-	-	2 Kelp	2 Kelp	-

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	<b>Menjadi (3) :</b> Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Supervisi, Bimtek dan Pembinaan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan	-	-	-	20 kali	20 kali	20 kali	-	-	20 kali	20 kali	
15	<b>Semula :</b> Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	<b>Semula :</b> Terjalannya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	60 org	100 orang	110 Org	-	-	-	100 orang	110 Org	-	-	
16	<b>Menjadi :</b> Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	<b>Menjadi :</b> Jumlah pengelola Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	-	-	-	110 Org	110 Org	110 Org	-	-	110 Org	110 Org	
17	<b>Semula :</b> Penguatan kelompok kerja mangrove	<b>Semula :</b> Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola mangrove	1 lap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Hutan Mangrove	<b>Menjadi(1) :</b> Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove	-	30 org	6 Kali	-	-	-	30 org	6 Kali	-	-	
19	<b>Menjadi (2) :</b> Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	
20	<b>Menjadi (2) :</b> Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	
21	<b>Menjadi (2) :</b> Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	
22	<b>Menjadi (2) :</b> Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	
23	<b>Menjadi (2) :</b> Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	-	-	-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	-	-	2 Kali	2 Kali	
24	<b>Menjadi (3) :</b> Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	<b>Menjadi (3) :</b> Jumlah Supervisi dan pembinaan Pengembangan hutan mangrove	-	-	-	5 Kali	5 Kali	5 Kali	-	-	5 Kali	5 Kali	
25	<b>Semula :</b> Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan peningkatan kelembagaan tani hutan	<b>Semula :</b> Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	-	94 orang	-	-	-	-	94 orang	-	-	-	
26	<b>Menjadi (1) :</b> Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	<b>Semula :</b> Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	-	-	75 Org	-	-	-	-	75 Org	-	-	
27	<b>Menjadi (2) :</b> Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	-	-	-	75 Org	75 Org	75 Org	-	-	75 Org	75 Org	
28	Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan (DBH-DR)	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang mengikuti Temu Teknis dan Penyusunan Program dan dan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun	-	-	360 Org / 2 unit	-	-	-	-	360 Org / 2 unit	-	-	
29	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH-DR)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	-	-	6 KTH	-	-	-	-	6 KTH	-	-	
30	<b>Semula :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	<b>Semula :</b> Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	-	-	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	-	-	
31	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	<b>Menjadi (1) :</b> Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
32	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (1) :</b> Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Siuniung	<b>Menjadi (1) :</b> Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Siuniung	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
34	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	<b>Menjadi (1) :</b> Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Solok	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
35	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (1) :</b> Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
36	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (1) :</b> Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
37	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	<b>Menjadi (1) :</b> Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
39	<b>Menjadi (1) :</b> Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (1) :</b> Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	
40	<b>Menjadi (2) :</b> Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	<b>Menjadi (2) :</b> Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	-	-	-	8 Kali	8 Kali	8 Kali	-	-	8 Kali	8 Kali	
41	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	-	-	-	5 Kelp	5 Kelp	5 Kelp	-	-	5 Kelp	5 Kelp	
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	19 kab/kota	2 Lap	10 UPTD/KPH	-	-	-	2 Lap	10 UPTD/KPH	-	-	
43	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (DBH-DR)	Jumlah kelompok pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha perhutanan sosial	-	-	50 Kelp	50 org/2 unit	-	-	-	50 Kelp	50 org/2 unit	-	
44	Penyiapan Perhutanan Sosial (DBH-DR)	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial yang terusulkan	-	-	10 Kelp	20 Kelp	-	-	-	10 Kelp	20 Kelp	-	
45	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH-DR)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	-	-	6 KTH	10 KTH	-	-	-	6 KTH	10 KTH	-	
46	Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan (DBH-DR)	(1) Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis (2) Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha KTH	-	-	160 org/ 80 org	160 org/90 org/15 org	-	-	-	160 org/ 80 org	160 org/90 org/15 org	-	
47	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan (DBH-DR)	Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan program penyuluh kehutanan PNS dan PKSM	-	-	90 org	-	-	-	-	90 org	-	-	
48	Sosialisasi Kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBH-DR)	(1) Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti bimtek RHL (2) Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha KTH	-	-	85 org / 90 org	-	-	-	-	85 org / 90 org	-	-	
49	Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBH-DR)	(1) Jumlah penyuluh kehutanan yang melaksanakan identifikasi areal RHL, survey sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL dan sosialisasi kebijakan RHL oleh penyuluh kehutanan (2) Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti FGD identifikasi areal RHL	-	-	-	60 org/ 60 org	-	-	-	-	60 org/ 60 org	-	
VIII	<b>Semula :</b> Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<b>Menjadi :</b> Peningkatan kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan	5.32 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Menjadi (1) :</b> Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<b>Menjadi (1) :</b> Peningkatan kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	
	<b>Menjadi (2) :</b> Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<b>Menjadi (2) :</b> Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	- <b>Semula</b> : Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	<b>Semula</b> : Terlaksananya pengembangan website dan sistem informasi kehutanan	19 kab/ kota	2 Lap	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	-
2	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	<b>Menjadi (1)</b> : Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	-	-	2 Lap	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-
3	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	<b>Menjadi (2)</b> : Jumlah Data dan Informasi Kehutanan yang dikembangkan	-	-	-	2 Lap	-	2 Lap	2 Lap	-	-	2 Lap	2 Lap
4	- <b>Semula (1)</b> : Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	<b>Semula (1)</b> : Tersedianya data Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)	-	-	1 Buku	-	-	-	-	1 Buku	-	-	-
5	- <b>Menjadi (2)</b> : Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	<b>Menjadi (2)</b> : Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	-	-	-	1 Buku	-	1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	1 Buku
6	- Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan	3 Lap	-	10 UPTD/ KPH	-	-	-	-	10 UPTD/ KPH	-	-	-
7	- <b>Semula</b> : Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP - <b>Menjadi</b> : Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	<b>Semula</b> : Terlaksananya implementasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat <b>Menjadi</b> : Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	3 Lap	4 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	4 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
8	- Peningkatana kapasitas SDM	Kebutuhan peningkatan SDM yang terpenuhi	-	-	24 kali	-	-	-	-	24 kali	-	-	-
IX	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	- <b>Semula</b> : Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	<b>Semula</b> : Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
	- <b>Menjadi</b> : Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	<b>Menjadi</b> : Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi.	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-
2	- <b>Semula</b> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Semula</b> : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
	- <b>Menjadi</b> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Menjadi</b> : Kebutuhan air, listrik dan telekomunikasi OPD Terpenuhi.	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-
3	- <b>Semula</b> : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	<b>Semula</b> : Terpenuhihnya pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan.	12 bin	12 bin	12 Bulan	-	-	-	12 bin	12 Bulan	-	-	-
	- <b>Menjadi</b> : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	<b>Menjadi</b> : Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	-	-	-	11 unit	11 unit	11 unit	-	-	11 unit	11 unit	-
4	- <b>Semula</b> : Penyediaan jasa kebersihan Kantor	<b>Semula</b> : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	- <b>Semula</b> : Penyediaan jasa sopir kantor	<b>Semula</b> : Tersedianya Jasa Sopir kantor	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	- <b>Semula</b> : Penyediaan jasa pengamanan kantor	<b>Semula</b> : Tersedianya makan dan minum untuk piket senjata api dan pengamanan kantor	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <b>Menjadi (1)</b> : Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	<b>Menjadi (1)</b> : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor.	-	12 Bin	-	-	-	-	12 Bin	-	-	-	-
	- <b>Menjadi (2)</b> : Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	<b>Menjadi (2)</b> : Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi.	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7	- <b>Semula</b> : Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Semula</b> : Tersedianya alat-alat tulis kantor.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
	- <b>Menjadi</b> : Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Menjadi</b> : Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-
8	- <b>Semula</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Semula</b> : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
	- <b>Menjadi</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Menjadi</b> : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	<b>Semula:</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Semula:</b> Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Menjadi:</b> Kebutuhan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang tersedia.	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	49 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	<b>Semula:</b> Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Semula:</b> Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Menjadi:</b> Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	
12	<b>Semula:</b> Penyediaan Makanan dan Minuman	<b>Semula:</b> Tersedianya makanan dan minuman rapat.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Penyediaan Makanan dan Minuman	<b>Menjadi:</b> Pertemuan / rapat yang diselenggarakan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	
13	<b>Semula:</b> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	<b>Semula:</b> Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	<b>Menjadi:</b> Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah yang di ikuti	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	
14	<b>Semula:</b> Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi dan Publikasi	<b>Semula:</b> Tersedianya Jasa Dokumentasi dan Publikasi.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi dan Publikasi	<b>Menjadi:</b> Publikasi kegiatan OPD yang tersedia.	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	
15	<b>Semula:</b> Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	<b>Semula:</b> Tersedianya jasa pembinaan mental dan fisik aparatur : instruktur senam, pembacaan al quran, ustadz.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	<b>Menjadi:</b> Wirid kantor dan kegiatan senam kantor.	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	
IX	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	Pengadaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor	Terpenuhiinya pengadaan dan perlengkapan gedung kantor	-	32 unit	-	-	-	-	32 unit	-	-	-	
2	<b>Semula:</b> Pembangunan Gedung kantor	<b>Semula:</b> Terlaksananya pembangunan gedung kantor.	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Pembangunan Gedung kantor	<b>Menjadi:</b> Gedung kantor yang terbangun.	-	-	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	
3	<b>Semula:</b> Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	<b>Semula:</b> Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua.	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	<b>Menjadi:</b> Kebutuhan kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi	-	-	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	
4	<b>Semula:</b> Pengadaan Mebeleur	<b>Semula:</b> Terlaksananya pengadaan meubelair.	72 Unit	15 Unit	-	-	-	-	15 Unit	15 Unit	-	-	
	<b>Menjadi:</b> Pengadaan Mebeleur	<b>Menjadi:</b> Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi.	-	-	15 Unit	5 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	5 Unit	15 Unit	
5	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi.	15 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi	Terlaksananya pengadaan alat studio, komunikasi dan informasi	10 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 Bulan	-	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	
8	<b>Semula:</b> Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Semula:</b> Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor.	-	14 unit	-	-	-	-	14 unit	-	-	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <b>Menjadi:</b> Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Menjadi:</b> Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi.	-	-	26 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	-	26 Unit	30 Unit	30 Unit	
9	- <b>Semula:</b> Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ mess	<b>Semula:</b> Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas.	6 Unit	11 Unit	-	-	-	-	11 Unit	-	-	-	
	- <b>Menjadi:</b> Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ mess	<b>Menjadi:</b> Rumah dinas/ mess yang terpelihara.	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 unit	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
10	- <b>Semula:</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<b>Semula:</b> Terlaksananya perbaikan sarana prasarana mushala, jendela dan atap gedung.	3 Unit	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	-	-	-	
	- <b>Menjadi:</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<b>Menjadi:</b> Gedung Kantor Dinas yang terpelihara.	-	-	3 Unit	8 Unit	8 Unit	8 unit	-	3 Unit	8 Unit	8 Unit	
11	- <b>Semula:</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	<b>Semula:</b> Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	
	- <b>Menjadi:</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	<b>Menjadi:</b> Kendaraan dinas operasional yang terpelihara.	-	-	12 Bulan	42 unit	42 unit	42 unit	-	12 Bulan	42 unit	42 unit	
12	- <b>Semula:</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	<b>Semula:</b> Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.	53 Unit	287 Unit	-	-	-	-	287 Unit	-	-	-	
	- <b>Menjadi:</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	<b>Menjadi:</b> Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	-	-	53 Unit	287 Unit	287 Unit	287 Unit	-	53 Unit	287 Unit	287 Unit	
13	- <b>Menjadi:</b> Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi	<b>Menjadi:</b> Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi	39 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	- <b>Semula:</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	<b>Semula:</b> Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi listrik, komputer dan jaringan internet kantor.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	
	- <b>Menjadi:</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	<b>Menjadi:</b> Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara.	-	-	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
X	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	- <b>Semula:</b> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>Semula:</b> Tersedianya pengadaan pakaian Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	154 orang	573 stel	-	-	-	-	573 stel	-	-	-	
	- <b>Menjadi:</b> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>Menjadi:</b> Kebutuhan pakaian dinas PNS / Non PNS yang terpenuhi	-	-	573 Org	573 Org	573 Org	573 Org	-	573 Org	573 Org	573 Org	
XI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lama PNS mengikuti Diklat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	- <b>Semula:</b> Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<b>Semula:</b> Terlaksananya keikutsertaan aparaturnya dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan.	14 Org	15 Kali	-	-	-	-	15 Kali	-	-	-	
	- <b>Menjadi:</b> Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<b>Menjadi:</b> Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	-	-	19 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	-	19 Kali	16 Kali	16 Kali	
XII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	- <b>Semula:</b> Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Semula:</b> Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan.	5 Dok	5 Dok	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	
	- <b>Menjadi:</b> Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Menjadi:</b> Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun.	-	-	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	-	5 Dok	5 Dok	5 Dok	
2	- <b>Semula:</b> Penatausahaan Keuangan SKPD	<b>Semula:</b> Honor KPA, PPTK, dan P serta Pengelolaan Keuangan OPD lainnya yang terbayarkan.	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Cat. Analisa		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	<b>Menjadi:</b> Penatausahaan Keuangan SKPD	<b>Menjadi:</b> Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	6 Dok	-	6 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	-	6 Dok	5 Dok	5 Dok	
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	
5	<b>Semula:</b> Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan yang terlaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	<b>Menjadi:</b> Monitoring dan evaluasi dan kegiatan SKPD	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan yang terlaksana	-	-	-	10 UPTD/ KPH	10 UPTD/ KPH	10 UPTD/ KPH	-	-	10 UPTD/ KPH	10 UPTD/ KPH	
XII	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Aset	Tingkat kesesuaian perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra. <b>Menjadi:</b> Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	-	6 Dok	-	-	-	-	6 Dok	-	-	-	
2	<b>Semula:</b> Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	<b>Menjadi:</b> Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan Kehutanan	-	2 Lap	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	
3	<b>Semula:</b> Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	<b>Menjadi:</b> Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorium pengelola aset	-	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	

Padang, Juli 2019  
KEPALA DINAS,



**YOZARWARDI U.P. S.Hut., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002

TABEL T-C.31.  
REVIEW TERHADAP RPKD TAHUN 2020  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>										
1.	<b>Pemantapan Kawasan Hutan</b>		<b>Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</b>	<b>100 %</b>	<b>1.334.00</b>	<b>Pemantapan Kawasan Hutan</b>		<b>Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</b>	<b>100 %</b>	<b>1.334.00</b>	
1	- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Kab. Agam, Kab. Pasaman dan Kab Sijunjung	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km	250.00	- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Kab. Agam, Kab. Pasaman dan Kab Sijunjung	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km	250.00	
2	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Agam Raya	3 unit	22.00	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Agam Raya	3 unit	22.00	
3	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	4 unit	27.50	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	4 unit	27.50	
4	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Sijunjung	2 unit	16.50	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Sijunjung	2 unit	16.50	
5	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Dharmasraya	2 unit	16.50	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Dharmasraya	2 unit	16.50	
6	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	1 unit	11.00	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	1 unit	11.00	
7	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	16.50	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	16.50	
8	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	1 unit	11.00	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	1 unit	11.00	
9	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Solok	4 unit	27.50	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Solok	4 unit	27.50	
10	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	8 unit	38.50	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	8 unit	38.50	
11	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Mentawai	2 unit	27.50	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Mentawai	2 unit	27.50	
12	- Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	10 UPTD KPH	Jumlah Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang dilakukan	20 Kali	344.50	- Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	10 UPTD KPH	Jumlah Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang dilakukan	20 Kali	344.50	
13	- Sosialisasi , identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Wilayah Kelola KPH	Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	20 Kali	140.00	- Sosialisasi , identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Wilayah Kelola KPH	Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	20 Kali	140.00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
14	- Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	1 buku	385.00	- Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	1 buku	385.00	
2	<b>Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase penurunan laju kerusakan hutan</b>	<b>7,15 %</b>	<b>5.124.20</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase penurunan laju kerusakan hutan</b>	<b>7,15 %</b>	<b>5.160.70</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>
1	- Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	5 Kasus	800.00	- Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	5 Kasus	800.00	
2	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Agam Raya	25 Kali	145.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Agam Raya	25 Kali	176.00	
3	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	25 Kali	176.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	25 Kali	176.00	
4	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Sijunjung	15 Kali	66.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Sijunjung	15 Kali	66.00	
5	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	15 Kali	66.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	15 Kali	66.00	
6	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	15 Kali	66.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	15 Kali	66.00	
7	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali	176.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali	176.00	
8	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	15 Kali	66.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	15 Kali	66.00	
9	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Solok	15 Kali	66.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Solok	15 Kali	66.00	
10	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	20 Kali	176.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	20 Kali	176.00	
11	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Mentawai	20 Kali	209.00	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Mentawai	20 Kali	209.00	
12	- Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Pengembangan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi	1 Lok	178.20	- Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Pengembangan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi	1 Lok	178.20	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
13	- Penyusunan peta laju kerusakan hutan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solok; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Peta Laju Kerusakan Hutan yang tersusun	6 peta	132.00	- Penyusunan peta laju kerusakan hutan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solok; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Peta Laju Kerusakan Hutan yang tersusun	6 peta	132.00	
14	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solok; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	450 orang	1,050.00	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solok; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	450 orang	1,050.00	
15	- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	19 Kab/Kota	Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan yang terlaksana	1 Lap	175.00	- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	19 Kab/Kota	Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan yang terlaksana	1 Lap	175.00	
16	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Wilayah Kelola KPH Agam Raya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Wilayah Kelola KPH Agam Raya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	
17	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	
18	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Wilayah Kelola KPH Sijunjung Yang di Konservasi	1 Lok	77.00	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Wilayah Kelola KPH Sijunjung Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	
19	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Wilayah Kelola KPH Dharmasraya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Wilayah Kelola KPH Dharmasraya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	
20	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	
21	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	
22	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Wilayah Kelola KPH Solok Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Wilayah Kelola KPH Solok Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	
23	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari Yang di Konservasi	1 Lok	82.50	
24	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Yang di Konservasi	3 Lok	247.50	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Yang di Konservasi	3 Lok	247.50	
25	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Wilayah Kelola KPH Mentawai Yang di Konservasi	1 Lok	110.00	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Wilayah Kelola KPH Mentawai Yang di Konservasi	1 Lok	110.00	
26	- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Wilayah Kelola KPH	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 unit	165.00	- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Wilayah Kelola KPH	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 unit	165.00	
27	- Pengukuran simpanan karbon	Wilayah Kelola KPH	Tersedianya data simpanan karbon	20 petak	400.00	- Pengukuran simpanan karbon	Wilayah Kelola KPH	Tersedianya data simpanan karbon	20 petak	400.00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
3.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	25 %	1,628.00	Program Pengendalian Kebakaran Hutan		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	25 %	1,673.60	Prov. Sumatera Barat
1	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Agam Raya	20 Kali	75.00	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Agam Raya	20 Kali	110.00	
2	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	20 Kali	110.00	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	20 Kali	110.00	
3	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Sijunjung	20 Kali	99.40	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Sijunjung	20 Kali	110.00	
4	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	20 Kali	110.00	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	20 Kali	110.00	
5	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	20 Kali	110.00	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	20 Kali	110.00	
6	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali	110.00	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali	110.00	
7	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	20 Kali	110.00	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	20 Kali	110.00	
8	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Solok	20 Kali	110.00	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Solok	20 Kali	110.00	
9	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	25 Kali	248.60	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	25 Kali	248.60	
10	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai	20 Kali	195.00	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai	20 Kali	195.00	
11	- Supervisi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	10 UPTD KPH	Jumlah supervisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	30 Kali	350.00	- Supervisi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	10 UPTD KPH	Jumlah supervisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	30 Kali	350.00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
4.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>		- <b>Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis</b>  - <b>Indeks Tutupan Hutan</b>	<b>2.21 %</b>  <b>61.84 %</b>	<b>3,675.24</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>		- <b>Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis</b>  - <b>Indeks Tutupan Hutan</b>	<b>2.21 %</b>  <b>61.84 %</b>	<b>3,675.24</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>
1	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	18 Kab/ Kota	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi	180 Ha	1,500.00	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	18 Kab/ Kota	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi	180 Ha	1,500.00	
2	- Evaluasi Keberhasilan Penanaman N-5	10 UPTD KPH	Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan	10 Lokasi	447.00	- Evaluasi Keberhasilan Penanaman N-5	10 UPTD KPH	Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan	10 Lokasi	447.00	
3	- Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	10 UPTD KPH	Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun	2 DAS	770.00	- Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	10 UPTD KPH	Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun	2 DAS	770.00	
4	- Penyusunan Dokumen Perencanaan RTnRL, RPRL	10 UPTD KPH	Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun	1 Buku	176.00	- Penyusunan Dokumen Perencanaan RTnRL, RPRL	10 UPTD KPH	Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun	1 Buku	176.00	
5	- Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	10 UPTD KPH	Jumlah bibit yang berkualitas	250,000 btg	450.00	- Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	10 UPTD KPH	Jumlah bibit yang berkualitas	250,000 btg	450.00	
6	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	10 UPTD KPH	Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	7 Sertifikat/ 2 buku	177.10	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	10 UPTD KPH	Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	7 unit	177.10	
7	- Konservasi Sumber Daya Genetik	10 UPTD KPH	Terbangun /terpeliharanya sumberdaya genetik	2 unit	155.14	- Konservasi Sumber Daya Genetik	10 UPTD KPH	Terbangun /terpeliharanya sumberdaya genetik	4 unit	155.14	
5	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>		<b>Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK</b>	<b>84 %</b>	<b>302.00</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>		<b>Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK</b>	<b>84 %</b>	<b>385.00</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>
1	- Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pessel, Kab. Pd. Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok.	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan	10 UPTD/ KPH	302.00	- Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pessel, Kab. Pd. Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok.	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan	10 UPTD/ KPH	385.00	
	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>		<b>Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK</b>	<b>83 %</b>	<b>3,349.60</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>		<b>Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK</b>	<b>83 %</b>	<b>3,385.10</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>
1	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Agam Raya	2 unit	16.50	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Agam Raya	2 unit	16.50	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pasaman Raya	5 unit	38.50	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pasaman Raya	5 unit	38.50	
2	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Sijunjung	2 unit	16.50	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Sijunjung	2 unit	16.50	
	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit	16.50	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit	16.50	
3	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	3 unit	23.10	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	3 unit	23.10	
4	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	26 unit	192.50	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	26 unit	192.50	
5	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 unit	27.50	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 unit	27.50	
6	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Solok	2 unit	16.50	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Solok	2 unit	16.50	
7	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Mentawai	10 unit	110.00	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Mentawai	10 unit	110.00	
	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	16.50	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	16.50	
8	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	10 UPTD KPH	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	20 Kali	150.00	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	10 UPTD KPH	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	20 Kali	150.00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
9	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak	89.50	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	
10	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	
11	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah petak pada Wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	2 petak	105.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah petak pada Wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	
12	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah petak pada Wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah petak pada Wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	
13	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah petak pada Wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah petak pada Wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	
14	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah petak pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah petak pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	
15	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah petak pada Wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah petak pada Wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	
16	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah petak pada Wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	3 petak	275.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah petak pada Wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	3 petak	275.00	
17	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah petak pada Wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah petak pada Wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00	
18	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah petak pada Wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	2 petak	165.00	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah petak pada Wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	2 petak	165.00	
19	- Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	4 Unit	242.00	- Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	4 Unit	242.00	
20	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 komoditi	110.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 komoditi	110.00	
21	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komoditi	110.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komoditi	110.00	
22	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 komoditi	100.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 komoditi	110.00	
23	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 komoditi	110.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 komoditi	110.00	
24	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 komoditi	110.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 komoditi	110.00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
25	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 komoditi	110.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 komoditi	110.00	
26	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	1 komoditi	110.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	1 komoditi	110.00	
27	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 komoditi	209.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 komoditi	209.00	
28	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi	110.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi	110.00	
29	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi	110.00	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi	110.00	
6	<b>Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan</b>		<b>Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat</b>	<b>14.86 %</b>	<b>2,825.40</b>	<b>Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan</b>		<b>Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat</b>	<b>14.86 %</b>	<b>2,672.40</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>
1	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Padang	Jumlah SDM pengelola HN, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas	180 Org	350.00	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Padang	Jumlah SDM pengelola HN, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas	180 Org	400.00	
2	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Agam Raya	3 Kelp	90.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Agam Raya	3 Kelp	90.00	
3	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3 Kelp	90.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3 Kelp	90.00	
4	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	3 Kelp	90.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	3 Kelp	90.00	
5	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelp	60.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelp	60.00	
6	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	2 Kelp	60.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	2 Kelp	60.00	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	3 Kelp	90.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	3 Kelp	90.00	
8	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	3 Kelp	90.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	3 Kelp	90.00	
9	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 Kelp	120.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 Kelp	120.00	
10	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	2 Kelp	60.00	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	2 Kelp	60.00	
11	- Supervisi, Birtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	Wilayah Kelola KPH	Jumlah Supervisi, Birtek dan Pembinaan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan	11 kali	103.40	- Supervisi, Birtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	Wilayah Kelola KPH	Jumlah Supervisi, Birtek dan Pembinaan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan	20 kali	103.40	
12	- Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung	Jumlah pengelola Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	110 Org	192.00	- Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung	Jumlah pengelola Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	110 Org	192.00	
13	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali	27.50	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali	27.50	
14	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Kali	27.50	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Kali	27.50	
15	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Kali	27.50	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Kali	27.50	
16	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 Kali	27.50	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 Kali	27.50	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
17	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	2 Kali	55.00	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	2 Kali	55.00	
18	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Wilayah Kelola KPH	Jumlah Supervisi dan pembinaan Pengembangan hutan mangrove	5 Kali	75.00	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Wilayah Kelola KPH	Jumlah Supervisi dan pembinaan Pengembangan hutan mangrove	5 Kali	75.00	
19	- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Padang	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	75 org	400.00	- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Padang	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	75 org	297.00	
20	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 Unit	55.00	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 Unit	55.00	
21	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit	55.00	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit	55.00	
22	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 Unit	55.00	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 Unit	55.00	
23	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 Unit	55.00	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 Unit	55.00	
24	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	1 Unit	55.00	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	1 Unit	55.00	
25	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Unit	55.00	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Unit	55.00	
26	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	1 Unit	55.00	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	1 Unit	55.00	
27	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	1 Unit	55.00	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	1 Unit	55.00	
28	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Wilayah Kelola KPH	Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	8 Kali	100.00	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Wilayah Kelola KPH	Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	8 Kali	100.00	
29	- Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Padang	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	5 Kelp	250.00	- Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Padang	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	5 Kelp	150.00	
7	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase Pengembangan Sistem dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 %</b>	<b>782.76</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase Pengembangan Sistem dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 %</b>	<b>851.00</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	19 Kab/Kota	Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan	2 Lap	371.76	- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	19 Kab/Kota	Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan	2 Lap	400.00	
2	- Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	Padang	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Lap	260.00	- Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	Padang	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Lap	300.00	
3	- Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan	Padang	Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	1 Buku	151.00	- Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan	Padang	Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	1 Buku	151.00	
8	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>4,039.20</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>3,601.86</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>
1	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Padang	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan	80.00	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Padang	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan	136.00	
2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Kebutuhan air, listrik dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 Bulan	798.24	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Kebutuhan air, listrik dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 Bulan	558.24	
3	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	12 Bulan	125.49	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	12 Bulan	18.63	
4	- Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	Padang	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan	1,670.46	- Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	Padang	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan	1,500.00	
5	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 bln	195.00	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 bln	200.00	
6	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bln	100.00	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bln	188.98	
7	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	110.00	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	121.00	
8	- Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Padang	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	36.30	- Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Padang	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	36.30	
9	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Pertemuan/ rapat yang diselenggarakan	12 Bulan	54.50	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Pertemuan/ rapat yang diselenggarakan	12 Bulan	77.00	
10	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Padang	Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah yang diikuti	12 Bulan	709.71	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Padang	Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah yang diikuti	12 Bulan	709.71	
11	- Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan	5.50	- Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan	5.50	
12	- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 bln	154.00	- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 bln	50.50	
9	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>2,165.20</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>2,178.60</b>	<b>Padang</b>
1	- Pengadaan Meubelair	Padang	Kebutuhan Mebeleur yang terpenuhi	14 Unit	95.10	- Pengadaan Meubelair	Padang	Kebutuhan Mebeleur yang terpenuhi	5 Unit	86.10	
2	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	47 Unit	340.60	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	30 Unit	250.00	
3	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Padang	Rumah dinas/ mess yang terpelihara	4 Unit	200.00	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Padang	Rumah dinas/ mess yang terpelihara	2 Unit	200.00	
4	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Gedung kantor dinas yang terpelihara	3 Unit	82.50	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Gedung kantor dinas yang terpelihara	3 Unit	82.50	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
5	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Padang	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan	702.00	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Padang	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan	600.00	
6	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Padang	peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	203 Unit	100.00	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Padang	peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	287 Unit	165.00	
7	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Padang	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 Bulan	50.00	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Padang	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 Bulan	200.00	
8	- Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan	padang	Rumah jabatan yang terehabilitasi	1 unit	595.00	- Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan	padang	Rumah jabatan yang terehabilitasi	1 unit	595.00	
10	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>	<b>100 %</b>	<b>365.00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>	<b>100 %</b>	<b>500.00</b>	
1.	- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas besera kelengkapannya	Padang	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	458 org	365.00	- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas besera kelengkapannya	Padang	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	573 org	500.00	
11	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>	<b>100 %</b>	<b>269.00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>	<b>100 %</b>	<b>319.00</b>	<b>Padang</b>
1.	- Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Kebutuhan pakaian Dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	63 kali	269.00	- Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Kebutuhan pakaian Dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	6 kali	319.00	
12	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD.</b>	<b>100 %</b>	<b>1,864.40</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD.</b>	<b>100 %</b>	<b>1,987.50</b>	<b>Padang</b>
1.	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5 Dok	154.00	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5 Dok	154.00	
2.	- Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	12 Bulan	697.40	- Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	12 Bulan	697.40	
3.	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	5 Dok	363.00	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	5 Dok	363.00	
4.	- Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Padang	Honorium Pengelola Aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan	300.00	- Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Padang	Honorium Pengelola Aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan	353.10	
5.	- Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Wilayah Kelola KPH	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan yang terlaksana	10 UPTD/ KPH	350.00	- Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Wilayah Kelola KPH	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan yang terlaksana	10 UPTD/ KPH	420.00	
					<b>27,724.00</b>				<b>Total</b>	<b>27,724.00</b>	

Padang, Juli 2019  
KEPALA DINAS,



**YOZARWARDI U.P. S.Hut., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002

**TABEL T-C.32.**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DINAS KEHUTANAN**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>URUSAN KEHUTANAN</b>					
<b>1.</b>	<b>Pemantapan Kawasan Hutan</b>		<b>Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</b>	<b>100 %</b>	<b>1,334.00</b>
1	- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Kab. Agam, Kab. Pasaman dan Kab Sijunjung	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km	250.00
2	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Agam Raya	3 unit	22.00
3	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	4 unit	27.50
4	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Sijunjung	2 unit	16.50
5	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Dharmasraya	2 unit	16.50
6	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	1 unit	11.00
7	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	16.50
8	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	1 unit	11.00
9	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Solok	4 unit	27.50
10	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	8 unit	38.50
11	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Mentawai	2 unit	27.50
12	- Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	10 UPTD KPH	Jumlah Supervisi dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang dilakukan	20 Kali	344.50
13	- Sosialisasi , identifikasi hutan adat dan penangan konflik tenurial	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	Jumlah sosialisasi , identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	1 buku	385.00
14	- Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	20 Kali	140.00
<b>2.</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase penurunan laju kerusakan hutan</b>	<b>6.15 %</b>	<b>5124.20</b>
1	- Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	5 Kasus	800.00
2	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Agam Raya	25 Kali	145.00
3	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	25 Kali	176.00
4	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Sijunjung	15 Kali	66.00
5	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	15 Kali	66.00
6	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	15 Kali	66.00

No. 1	PROGRAM/KEGIATAN 2	Lokasi 3	INDIKATOR KINERJA 4	Besaran Volume 5	Catatan 6
7	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutananyang dilakukan Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali	176.00
8	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	15 Kali	66.00
9	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Solok	15 Kali	66.00
10	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	20 Kali	176.00
11	- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Mentawai	20 Kali	209.00
12	- Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Pengembangan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi	1 Lok	178.20
13	- Penyusunan peta laju kerusakan hutan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar;	Peta Laju Kerusakan Hutan yang tersusun	6 peta	132.00
14	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	450 orang	1,050.00
15	- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	19 Kab/Kota	Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan yang terlaksana	1 Lap	175.00
16	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Wilayah Kelola KPH Agam Raya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50
17	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50
18	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Wilayah Kelola KPH Sijunjung Yang di Konservasi	1 Lok	77.00
19	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Wilayah Kelola KPH Dharmasraya Yang di Konservasi	1 Lok	82.50
20	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan Yang di Konservasi	1 Lok	82.50
21	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota Yang di Konservasi	1 Lok	82.50
22	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Wilayah Kelola KPH Solok Yang di Konservasi	1 Lok	82.50
23	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari Yang di Konservasi	1 Lok	82.50
24	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Wilayah Kelola KPH Bukti Barisan Yang di Konservasi	3 Lok	247.50
25	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Wilayah Kelola KPH Mentawai Yang di Konservasi	1 Lok	110.00
26	- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Wilayah Kelola KPH	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 unit	165.00
27	- Pengukuran simpanan karbon	Wilayah Kelola KPH	Tersedianya data simpanan karbon	20 petak	400.00
3.	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>		<b>Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)</b>	<b>20 %</b>	<b>1,628.00</b>

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Agam Raya	20 Kali	75.00
2	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	20 Kali	110.00
3	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Sijunjung	20 Kali	99.40
4	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	20 Kali	110.00
5	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	20 Kali	110.00
6	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali	110.00
7	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	20 Kali	110.00
8	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Solok	20 Kali	110.00
9	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	25 Kali	248.60
10	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai	20 Kali	195.00
11	- Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	10 UPTD KPH	Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	17 Kali	350.00
<b>4.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>		<b>- Persentase penurunan Luas Lahan Kritis</b>	<b>2.00 %</b>	<b>3,675.24</b>
			<b>- Indeks Tutupan Hutan</b>	<b>62.67 %</b>	
1	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	18 Kab/ Kota	Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi	180 Ha	1,500.00
2	- Evaluasi Keberhasilan Penanaman N-5	10 UPTD KPH	Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan	10 Lokasi	447.00
3	- Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	10 UPTD KPH	Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun	2 DAS	770.00
4	- Penyusunan Dokumen Perencanaan RTnRL, RPRL	10 UPTD KPH	Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun	1 Buku	176.00
5	- Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	10 UPTD KPH	Jumlah bibit yang berkualitas	250,000 btg	450.00
6	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	10 UPTD KPH	Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	7 Sertifikat/ 2 buku	177.10
7	- Konservasi Sumber Daya Genetik	10 UPTD KPH	Terbangun /terpeliharanya sumberdaya genetik	2 unit	155.14
<b>5</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>		<b>Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK</b>	<b>84 %</b>	<b>302.00</b>
1	- Monitoring PNBP Sektor Kehutanan	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pessel, Kab. Pd. Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok.	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan	10 UPTD/ KPH	302.00
	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>		<b>Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK</b>	<b>84 %</b>	<b>3,349.60</b>

No. 1	PROGRAM/KEGIATAN 2	Lokasi 3	INDIKATOR KINERJA 4	Besaran Volume 5	Catatan 6
2	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Agam Raya	2 unit	16.50
3	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pasaman Raya	5 unit	38.50
4	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Sijunjung	2 unit	16.50
5	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit	16.50
6	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	3 unit	23.10
7	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	26 unit	192.50
8	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 unit	27.50
9	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Solok	2 unit	16.50
10	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Mentawai	10 unit	110.00
11	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	16.50
12	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	10 UPTD KPH	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	20 Kali	150.00
13	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak	89.50
14	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00
15	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah petak pada Wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	2 petak	105.00
16	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah petak pada Wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00
17	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah petak pada Wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00
18	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah petak pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00
19	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah petak pada Wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00
20	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab.	Jumlah petak pada Wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	3 petak	275.00
21	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah petak pada Wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.00
22	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah petak pada Wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	2 petak	165.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
23	- Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	4 Unit	242.00
24	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 komoditi	110.00
25	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komoditi	110.00
26	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 komoditi	100.00
27	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 komoditi	110.00
28	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 komoditi	110.00
29	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 komoditi	110.00
30	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	1 komoditi	110.00
31	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 komoditi	209.00
32	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi	110.00
33	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi	110.00
<b>6</b>	<b>Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan</b>		<b>Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat</b>	<b>14.86 %</b>	<b>2,825.40</b>
1	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Padang	Jumlah SDM pengelola HN, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas	180 Org	350.00
2	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	3 Kelp	90.00
3	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3 Kelp	90.00
4	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	3 Kelp	90.00
5	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelp	60.00
6	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	2 Kelp	60.00
7	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	3 Kelp	90.00
8	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	3 Kelp	90.00
9	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 Kelp	120.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
10	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Solok	Kabupaten Solok	Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	2 Kelp	60.00
11	- Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	Wilayah Kelola KPH	Jumlah Supervisi, Bimtek dan Pembinaan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan	11 kali	103.40
12	- Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung	Jumlah pengelola Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	110 Org	192.00
13	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali	27.50
14	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Kali	27.50
15	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Kali	27.50
16	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 Kali	27.50
17	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	2 Kali	55.00
18	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Wilayah Kelola KPH	Jumlah Supervisi dan pembinaan Pengembangan hutan mangrove	5 Kali	75.00
19	- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Padang	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	75 org	400.00
20	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 Unit	55.00
21	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit	55.00
22	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 Unit	55.00
23	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 Unit	55.00
24	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	1 Unit	55.00
25	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Unit	55.00
26	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	1 Unit	55.00
27	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	1 Unit	55.00
28	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Wilayah Kelola KPH	Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	8 Kali	100.00
29	- Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Padang	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	5 Kelp	250.00
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Persentase Pengembangan Sistem dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>100.00 %</b>	<b>782.76</b>
1	- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	19 Kab/Kota	Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan	2 Lap	371.76

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2	- Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	Padang	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Lap	260.00
3	- Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan	Padang	Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	1 Buku	151.00
<b>8</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>4,039.20</b>
1	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Padang	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan	80.00
2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Kebutuhan air, listrik dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 Bulan	798.24
3	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	12 Bulan	125.49
4	- Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	Padang	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan	1,670.46
5	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 bln	195.00
6	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bln	100.00
7	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	110.00
8	- Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Padang	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	36.30
9	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Pertemuan/ rapat yang diselenggarakan	12 Bulan	54.50
10	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Padang	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah yang diikuti	12 Bulan	709.71
11	- Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan	5.50
12	- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 bln	154.00
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>2,165.20</b>
1	- Pengadaan Meubelair	Padang	Kebutuhan Mebeleur yang terpenuhi	15 Unit	95.10
2	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	30 Unit	340.60
3	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Padang	Rumah dinas/ mess yang terpelihara	2 Unit	200.00
4	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Gedung kantor dinas yang terpelihara	3 Unit	82.50
5	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Padang	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan/ 55 unit	702.00
6	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Padang	peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	203 Unit	100.00
7	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Padang	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 Bulan	50.00
8	- Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan	Padang	Rumah jabatan yang terehabilitasi	1 unit	595.00
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>	<b>100 %</b>	<b>365.00</b>
1	- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Padang	Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	458 org	365.00
<b>11</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>	<b>100 %</b>	<b>269.00</b>
1	- Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	63 kali	269.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
12	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD.</b>	<b>100 %</b>	<b>1,864.40</b>
1	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5 Dok	154.00
2	- Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	12 Bulan	697.40
3	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	5 Dok	363.00
4	- Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Padang	Honorium Pengelola Aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan	300.00
5	- Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Wilayah Kelola KPH	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan yang terlaksana	10 UPTD/ KPH	350.00
					<b>27,724.00</b>

Padang, Juli 2019

KEPALA DINAS.



**YOZARWARDI U.P. S.Hut., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

TABEL T-C.33.  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>URUSAN KEHUTANAN</b>									
2	00 04 01 001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100 %</b>	<b>4,039,200,000.00</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>5,180,000,000.00</b>
2	00 04 01 001 0001	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Padang	12 Bulan	80,000,000.00	APBD		12 Bulan	110,000,000.00
2	00 04 01 001 0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	12 Bulan	798,240,000.00	APBD		12 Bulan	1,100,000,000.00
2	00 04 01 001 0006	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	12 Bulan	125,490,000.00	APBD		11 Unit	128,000,000.00
2	00 04 01 001 0003	- Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	Padang	12 Bulan	1,670,457,040.00	APBD		12 Bulan	1,700,000,000.00
2	00 04 01 001 0008	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	12 bln	195,000,000.00	APBD		12 Bulan	350,000,000.00
2	00 04 01 001 0009	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	12 bln	100,000,000.00	APBD		12 Bulan	200,000,000.00
2	00 04 01 001 0010	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	12 Bulan	110,000,000.00	APBD		12 Bulan	150,000,000.00
2	00 04 01 001 0013	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Padang	12 Bulan	36,300,000.00	APBD		12 Bulan	50,000,000.00
2	00 04 01 001 0024	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	12 Bulan	54,502,960.00	APBD		12 Bulan	120,000,000.00
2	00 04 01 001 0015	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Padang	12 Bulan	709,710,000.00	APBD		12 Bulan	1,200,000,000.00
2	00 04 01 001 0017	- Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	12 Bulan	5,500,000.00	APBD		12 Bulan	12,000,000.00
2	00 04 01 001 0018	- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	12 bln	154,000,000.00	APBD		12 Bulan	60,000,000.00
2	00 04 01 002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>2,165,200,000.00</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>3,133,000,000.00</b>
2	00 04 01 002 0001	- Pengadaan Mebeleur	Padang	14 Unit	95,100,000.00	APBD		5 Unit	250,000,000.00
2	00 04 01 002 0371	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	47 Unit	340,600,000.00	APBD		30 Unit	300,000,000.00
2	00 04 01 002 0055	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Padang	4 Unit	200,000,000.00	APBD		2 Unit	833,000,000.00
2	00 04 01 002 0005	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	3 Unit	82,500,000.00	APBD		12 Unit	700,000,000.00

2	00	04	01	002	0006	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Padang	12 Bulan/ 55 unit	702,000,000.00	APBD		12 Bulan	650,000,000.00
2	00	04	01	002	0007	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Padang	203 Unit	100,000,000.00	APBD		53 Unit	200,000,000.00
2	00	04	01	002	0023	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	Padang	12 Bulan	50,000,000.00	APBD		12 Bulan	200,000,000.00
2	00	04	01	002		- Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan	- Rumah jabatan yang terehabilitasi	Padang	1 Unit	595,000,000.00	APBD		-	-
2	00	04	01	003		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>		<b>100 %</b>	<b>365,000,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>719,000,000.00</b>
2	00	04	01	003	0001	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	Padang	458 org	365,000,000.00	APBD		573 Org	719,000,000.00
2	00	04	01	004		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rata-rata lama PNS mengikuti Diklat</b>		<b>100 %</b>	<b>269,000,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>348,000,000.00</b>
2	00	04	01	004	0001	- Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	Padang	63 kali	269,000,000.00	APBD		16 Kali	348,000,000.00
2	00	04	01	005		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD</b>		<b>100 %</b>	<b>1,864,400,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>1,397,000,000.00</b>
2	00	04	01	005	0003	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	Padang	5 Dok	154,000,000.00	APBD		5 Dok	140,000,000.00
2	00	04	01	005	0001	- Penatausahaan Keuangan SKPD	- Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	Padang	12 Bulan	697,400,000.00	APBD		5 Dok	507,000,000.00
2	00	04	01	005	0002	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	- Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	Padang	5 Dok	363,000,000.00	APBD		12 Bulan	350,000,000.00
2	00	04	01	002	0011	- Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	- Honorium Pengelola Aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	Padang	12 bulan	300,000,000.00	APBD		12 Bulan	150,000,000.00
2	00	04	01	078	0010	- Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	- Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan yang terlaksana	Wilayah Kelola KPH	10 UPTD/ KPH	350,000,000.00	APBD		10 UPTD/ KPH	250,000,000.00
2	00	04	01	127		<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK</b>		<b>84 %</b>	<b>302,000,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>85 %</b>	<b>554,000,000.00</b>
2	00	04	01	127	0001	- Monitoring PNBP Sektor Kehutanan	- Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pessel, Kab. Pd. Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok.	10 UPTD/ KPH	302,000,000.00	APBD		10 UPTD/ KPH	554,000,000.00
2	00	04	01	127		<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>Persentase Pencapaian Target Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>		<b>84 %</b>	<b>3,349,600,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>85 %</b>	<b>4,868,000,000.00</b>

2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Agam Raya	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota	2 unit	16,500,000.00	APBD		2 unit	30,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	5 unit	38,500,000.00	APBD		5 unit	75,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	2 unit	16,500,000.00	APBD		2 unit	30,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	2 unit	16,500,000.00	APBD		2 unit	30,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	3 unit	23,100,000.00	APBD		3 unit	45,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	26 unit	192,500,000.00	APBD		26 unit	260,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	4 unit	27,500,000.00	APBD		4 unit	60,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	2 unit	16,500,000.00	APBD		2 unit	30,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	10 unit	110,000,000.00	APBD		10 unit	175,000,000.00
2	00	04	01	127	0002	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya	2 unit	16,500,000.00	APBD		10 unit	30,000,000.00

2	00	04	01	127	0002	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	- Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	10 UPTD KPH	20 Kali	150,000,000.00	APBD		20 Kali	250,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	- Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	2 petak	89,500,000.00	APBD		2 petak	140,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	- Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	2 petak	110,000,000.00	APBD		2 petak	140,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	Kabupaten Sijunjung	2 petak	105,000,000.00	APBD		2 petak	140,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	Kabupaten Dharmasraya	2 petak	110,000,000.00	APBD		2 petak	140,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	Kabupaten Pesisir Selatan	2 petak	110,000,000.00	APBD		2 petak	140,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	Kabupaten Solok Selatan	2 petak	110,000,000.00	APBD		2 petak	140,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	Kabupaten Limapuluh Kota	2 petak	110,000,000.00	APBD		2 petak	140,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	3 petak	275,000,000.00	APBD		3 petak	380,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	Kabupaten Solok	2 petak	110,000,000.00	APBD		2 petak	140,000,000.00
2	00	04	01	127	0003	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	Kab. Kepulauan Mentawai	2 petak	165,000,000.00	APBD		2 petak	230,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengembangan Kemitraan Kehutanan	- Jumlah kemitraan yang difasilitasi	Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung	4 Unit	242,000,000.00	APBD		4 unit	450,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	1 komoditi	110,000,000.00	APBD		1 komoditi	150,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	1 komoditi	110,000,000.00	APBD		1 komoditi	150,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	Kabupaten Sijunjung	1 komoditi	100,000,000.00	APBD		1 komoditi	150,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	Kabupaten Dharmasraya	1 komoditi	110,000,000.00	APBD		1 komoditi	150,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	Kabupaten Solok Selatan	1 komoditi	110,000,000.00	APBD		1 komoditi	150,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	Kabupaten Pesisir Selatan	1 komoditi	110,000,000.00	APBD		1 komoditi	150,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	Kabupaten Limapuluh Kota	1 komoditi	110,000,000.00	APBD		1 komoditi	150,000,000.00

2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	1 komoditi	209,000,000.00	APBD		1 komoditi	275,000,000.00
2	00	04	01	127	0004	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	Kabupaten Solok	1 komoditi	110,000,000.00	APBD		1 komoditi	150,000,000.00
2	00	04	01	127	0005	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	Kab. Kepulauan Mentawai	1 komoditi	110,000,000.00	APBD		4 Unit	198,000,000.00
2	00	04	01	129		<b>Perhutanan Sosial dan Kemitraan</b>	<b>Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat</b>		<b>18.03 %</b>	<b>2,825,400,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>21.21 %</b>	<b>4,551,000,000.00</b>
2	00	04	01	129	0002	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	- Jumlah SDM pengelola HN, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas	Padang	180 Org	350,000,000.00	APBD		180 Org	600,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Agam Raya	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	3 Kelp	90,000,000.00	APBD		3 Kelp	150,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Pasaman Raya	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	3 Kelp	90,000,000.00	APBD		3 Kelp	150,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Sijunjung	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	3 Kelp	90,000,000.00	APBD		3 Kelp	150,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Dharmasraya	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	2 Kelp	60,000,000.00	APBD		2 Kelp	100,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Pesisir Selatan	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	2 Kelp	60,000,000.00	APBD		2 Kelp	100,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	3 Kelp	90,000,000.00	APBD		3 Kelp	150,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Limapuluh Kota	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	3 Kelp	90,000,000.00	APBD		3 Kelp	150,000,000.00

2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Bukit Barisan	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	4 Kelp	120,000,000.00	APBD		4 Kelp	200,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Solok	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan pada wilayah kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	2 Kelp	60,000,000.00	APBD		2 Kelp	100,000,000.00
2	00	04	01	129	0003	- Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	- Jumlah Supervisi, Bimtek dan Pembinaan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan	Wilayah Kelola KPH	11 kali	103,400,000.00	APBD		20 kali	250,000,000.00
2	00	04	01	129	0005	- Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Jumlah pengelola Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	Kab. Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung	110 Org	192,000,000.00	APBD		110 Org	360,000,000.00
2	00	04	01	129	0004	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	- Jumlah Koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman Barat	1 Kali	27,500,000.00	APBD		1 Kali	80,000,000.00
2	00	04	01	129	0004	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	- Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang	1 Kali	27,500,000.00	APBD		1 Kali	80,000,000.00
2	00	04	01	129	0004	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	- Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam	1 Kali	27,500,000.00	APBD		1 Kali	80,000,000.00
2	00	04	01	129	0004	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	- Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Kali	27,500,000.00	APBD		1 Kali	80,000,000.00
2	00	04	01	129	0004	- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	- Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Kali	55,000,000.00	APBD		2 Kali	126,000,000.00
2	00	04	01	129	0004	- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	- Jumlah Supervisi dan pembinaan Pengembangan hutan mangrove	Wilayah Kelola KPH	5 Kali	75,000,000.00	APBD		5 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	129	0006	- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	- Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	Padang	75 org	400,000,000.00	APBD		75 Org	350,000,000.00
2	00	04	01	129	0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	1 Unit	55,000,000.00	APBD		1 Unit	90,000,000.00
2	00	04	01	129	0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	1 Unit	55,000,000.00	APBD		1 Unit	90,000,000.00
2	00	04	01	129	0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	1 Unit	55,000,000.00	APBD		1 Unit	90,000,000.00

2	00	04	01	129	0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	1 Unit	55,000,000.00	APBD		1 Unit	90,000,000.00
2	00	04	01	129	0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	55,000,000.00	APBD		1 Unit	90,000,000.00
2	00	04	01	129	0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	55,000,000.00	APBD		1 Unit	90,000,000.00
2	00	04	01	129	0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	1 Unit	55,000,000.00	APBD		1 Unit	90,000,000.00
2	00	04	01	129	0007	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	1 Unit	55,000,000.00	APBD		1 Unit	90,000,000.00
						- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	- Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	Wilayah Kelola KPH	8 Kali	100,000,000.00	APBD		8 Kali	150,000,000.00
						- Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	Padang	5 Kelp	250,000,000.00	APBD		5 Kelp	250,000,000.00
2	00	04	01	130		<b>Pemantapan Kawasan Hutan</b>	<b>Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</b>		<b>100 %</b>	<b>1,334,000,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>1,919,000,000.00</b>
2	00	04	01	130	0003	- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	Kab. Agam, Kab. Pasaman dan Kab Sijunjung	70 km	250,000,000.00	APBD		70 km	314,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Agam Raya	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	3 unit	22,000,000.00	APBD		3 Unit	45,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pasaman Raya	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	4 unit	27,500,000.00	APBD		4 Unit	60,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Sijunjung	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	2 unit	16,500,000.00	APBD		2 Unit	30,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	2 unit	16,500,000.00	APBD		2 Unit	30,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pesisir Selatan	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	1 unit	11,000,000.00	APBD		1 Unit	15,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	2 unit	16,500,000.00	APBD		2 Unit	30,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Limapuluh Kota	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	1 unit	11,000,000.00	APBD		1 unit	15,000,000.00

2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Solok	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	4 unit	27,500,000.00	APBD		4 Unit	60,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	8 unit	38,500,000.00	APBD		8 Unit	120,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	2 unit	27,500,000.00	APBD		2 Unit	60,000,000.00
2	00	04	01	130	0001	- Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	- Jumlah Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang dilakukan	10 UPTD KPH	20 Kali	344,500,000.00	APBD		20 Kali	440,000,000.00
2	00	04	01	130	0004	- Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	- Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	20 Kali	140,000,000.00	APBD		20 kali	200,000,000.00
2	00	04	01	130	0002	- Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan	- Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	1 buku	385,000,000.00	APBD		1 buku	500,000,000.00
2	00	04	01	077		<b>Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam</b>	<b>Semula : Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani Menjadi : Persentase penurunan laju kerusakan hutan</b>		<b>14 %</b>	<b>5,124,200,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>15 %</b>	<b>7,422,000,000.00</b>
2	00	04	01	077	0007	- Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat	5 Kasus	800,000,000.00	APBD		5 Kali	1,100,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Agam Raya	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	25 Kali	145,000,000.00	APBD		25 Kali	225,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	25 Kali	176,000,000.00	APBD		25 Kali	225,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Sijunjung	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	15 Kali	66,000,000.00	APBD		15 Kali	175,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	15 Kali	66,000,000.00	APBD		15 Kali	175,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	15 Kali	66,000,000.00	APBD		15 Kali	175,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	20 Kali	176,000,000.00	APBD		15 Kali	175,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	15 Kali	66,000,000.00	APBD		20 Kali	200,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Solok	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	15 Kali	66,000,000.00	APBD		15 Kali	175,000,000.00

						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	20 Kali	176,000,000.00	APBD		20 Kali	275,000,000.00
						- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Mentawai	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	20 Kali	209,000,000.00	APBD		20 Kali	300,000,000.00
2	00	04	01	077	0004	- Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Pengembangan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	1 Lok	178,200,000.00	APBD		1 Lok	250,000,000.00
2	00	04	01	077	0010	- Penyusunan peta laju kerusakan hutan	- Peta Laju Kerusakan Hutan yang tersusun	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	6 peta	132,000,000.00	APBD		6 Peta	300,000,000.00
2	00	04	01	077	0011	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	450 orang	1,050,000,000.00	APBD		450 orang	1,300,000,000.00
2	00	04	01	077	0008	- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan yang terlaksana	19 Kab/Kota	1 Lap	175,000,000.00	APBD		1 Lap	227,000,000.00
2	00	04	01	077	0005	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- Wilayah Kelola KPH Agam Raya Yang di Konservasi	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	1 Lok	82,500,000.00	APBD		1 Lok	120,000,000.00
2	00	04	01	077	0009	- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya Yang di Konservasi	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	1 Lok	82,500,000.00	APBD		1 Lok	120,000,000.00
						- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- Wilayah Kelola KPH Sijunjung Yang di Konservasi	Kabupaten Sijunjung	1 Lok	77,000,000.00	APBD		1 Lok	120,000,000.00
						- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	- Wilayah Kelola KPH Dharmasraya Yang di Konservasi	Kabupaten Dharmasraya	1 Lok	82,500,000.00	APBD		1 Lok	120,000,000.00
						- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	- Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan Yang di Konservasi	Kabupaten Pesisir Selatan	1 Lok	82,500,000.00	APBD		1 Lok	120,000,000.00
						- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	- Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota Yang di Konservasi	Kabupaten Limapuluh Kota	1 Lok	82,500,000.00	APBD		1 Lok	120,000,000.00
						- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	- Wilayah Kelola KPH Solok Yang di Konservasi	Kabupaten Solok	1 Lok	82,500,000.00	APBD		1 Lok	120,000,000.00
						- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	- Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari Yang di Konservasi	Kabupaten Solok Selatan	1 Lok	82,500,000.00	APBD		1 Lok	120,000,000.00
						- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	- Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Yang di Konservasi	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	3 Lok	247,500,000.00	APBD		1 Lok	360,000,000.00
						- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	- Wilayah Kelola KPH Mentawai Yang di Konservasi	Kab. Kepulauan Mentawai	1 Lok	110,000,000.00	APBD		3 Lok	175,000,000.00
						- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	- Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	Wilayah Kelola KPH	1 unit	165,000,000.00	APBD		1 Lok	200,000,000.00

2	00	04	01	077	0006	- Pengukuran simpanan karbon	- Tersedianya data simpanan karbon	Wilayah Kelola KPH	20 petak	400,000,000.00	APBD		1 unit	450,000,000.00
2	00	04	01	133		<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>	<b>Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)</b>		<b>55 %</b>	<b>1,628,000,000.00</b>			<b>60 %</b>	<b>2,407,000,000.00</b>
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Agam Raya	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Agam Raya	Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh	20 Kali	75,000,000.00	APBD		20 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	20 Kali	110,000,000.00	APBD		20 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Sijunjung	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	20 Kali	99,400,000.00	APBD		20 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Dharmasraya	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	20 Kali	110,000,000.00	APBD		20 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pesisir Selatan	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	20 Kali	110,000,000.00	APBD		20 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan	20 Kali	110,000,000.00	APBD		20 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Limapuluh Kota	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	Kabupaten Limapuluh Kota	20 Kali	110,000,000.00	APBD		20 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Solok	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Solok	Kabupaten Solok	20 Kali	110,000,000.00	APBD		20 Kali	175,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Bukit Barisan	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	25 Kali	248,600,000.00	APBD		25 Kali	300,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Mentawai	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	20 Kali	195,000,000.00	APBD		20 Kali	277,000,000.00
2	00	04	01	133	0001	- Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	- Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	10 UPTD KPH	17 Kali	350,000,000.00	APBD		30 Kali	430,000,000.00
2	00	04	01	080		<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase penurunan Luas Lahan Kritis Indeks Tutupan Lahan</b>		<b>2.21 %</b>	<b>3,675,240,000.00</b>	APBD		<b>2.26 %</b>	<b>5,286,000,000.00</b>
2	00	04	01	080	0001	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	- Lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi	18 Kab/ Kota	180 Ha	1,500,000,000.00	APBD		180 Ha	1,926,000,000.00
2	00	04	01	080	0002	- Evaluasi Keberhasilan Penanaman N-5	- Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan	10 UPTD KPH	10 Lokasi	447,000,000.00	APBD		10 Lokasi	600,000,000.00
2	00	04	01	080	0003	- Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	- Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun	10 UPTD KPH	2 DAS	770,000,000.00	APBD		2 DAS	950,000,000.00

						- Penyusunan Dokumen Perencanaan RTnRL, RPRL	- Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun	10 UPTD KPH		1 Buku	176,000,000.00	APBD		1 Buku	320,000,000.00
2	00	04	01	080	0004	- Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	- Jumlah bibit yang berkualitas	10 UPTD KPH		250,000 btg	450,000,000.00	APBD		250,000 btg	850,000,000.00
2	00	04	01	128	0002	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	10 UPTD KPH		7 unit/ 2 sertifikat	177,100,000.00	APBD		8 unit	320,000,000.00
2	00	04	01	128	0003	- Konservasi Sumber Daya Genetik	- Terbangun /terpeliharanya sumberdaya genetik	10 UPTD KPH		2 unit	155,140,000.00	APBD		2 unit	320,000,000.00
2	00	04	01	078		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>			<b>100 %</b>	<b>782,760,000.00</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>2,089,000,000.00</b>
2	00	04	01	078	0006	- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan	19 Kab/Kota		2 Lap	371,760,000.00	APBD		2 Lap	839,000,000.00
2	00	04	01	078	0007	- Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	- Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Padang		2 Lap	260,000,000.00	APBD		2 Lap	700,000,000.00
2	00	04	01	078	0008	- Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan	- Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	Padang		1 Buku	151,000,000.00	APBD		1 Buku	550,000,000.00
<b>Total</b>											<b>27,724,000,000.00</b>				<b>39,873,000,000.00</b>

Padang, Juli 2019  
KEPALA DINAS,



**YOZARWARDI U.P. S.Hut., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002